

KEWIRAUSAHAAN
D**IAN**
MOTIVASI
ROLE MODEL WIRAUSAHA BARU



DR. ANEU YULIANEU, ST., SE., MM
DR. MUHAMAD NURDIN YUSUF, SE., MP



KEWIRAUSAHAAN dan MOTIVASI

Dr. Aneu Yulianeu, S.T., S.E., M.M.

Dr. Muhamad Nurdin Yusuf, S.E., M.P.

Langgam

Tasikmalaya:
Langgam Pustaka

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta
Lingkup Hak Cipta

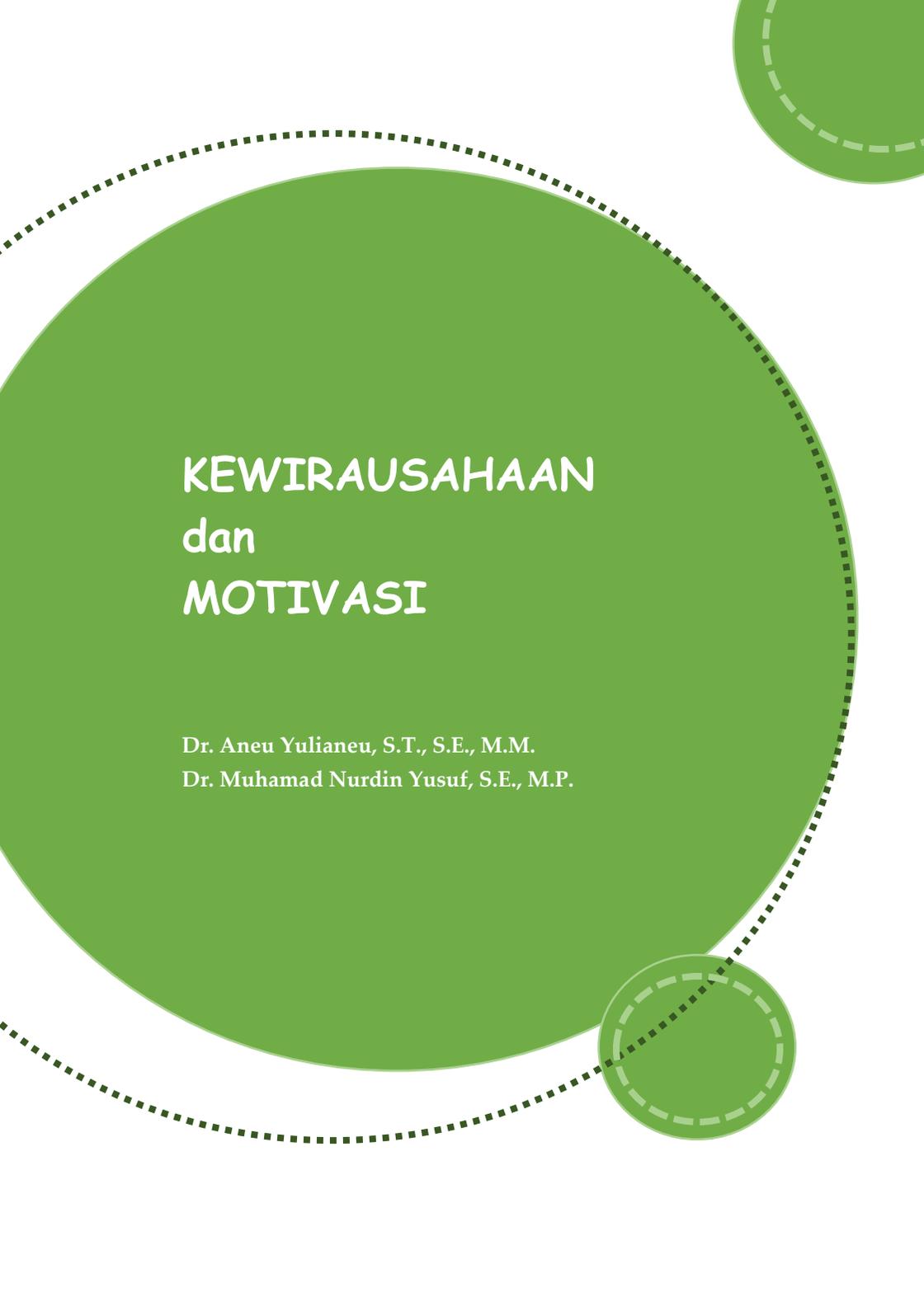
Pasal 2:

1. Hak cipta merupakan hak eksklusif bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketentuan Pidana

Pasal 72:

1. Barang siapa dengan sengaja melanggar dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 Ayat (1) dan Ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
2. Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta atau hak terkait sebagai dimaksud dalam Ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).



KEWIRAUSAHAAN dan MOTIVASI

Dr. Aneu Yulianeu, S.T., S.E., M.M.

Dr. Muhamad Nurdin Yusuf, S.E., M.P.

Perpustakaan Nasional RI

Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Yulianeu, Aneu & Muhamad Nurdin Yusuf/Kewirausahaan dan Motivasi

Tasikmalaya: Langgam Pustaka

KEWIRAUSAHAAN DAN MOTIVASI

© Aneu Yulianeu & Muhamad Nurdin Yusuf

Pemeriksa Ejaan: Mufidz At-thoriq S.

Tata Letak Isi: Fauzan Labib A.

Cetakan Pertama, Desember 2022

xi + 94 hlm., 14,8 x 21 cm

ISBN 978-623-8010-30-1

Diterbitkan oleh **LANGGAM PUSTAKA**

Perum Bukit Indhiang Permai Blok C2, Cirapih, Indhiang, Tasikmalaya.

Laman: www.langgampustaka.com

Email: apresiasikaryaakasia@gmail.com

Kontak: 0821-2742-4881

Hak Cipta dilindungi undang-undang.

All rights reserved.

Ucapan Terima Kasih

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang terkait dalam pembuatan buku referensi ini. Yang pertama dan terutama adalah Allah Swt. yang telah melimpahkan kepada penulis rahmat, hikmat, waktu dan kesempatan bagi penulis. Buku ini masih jauh dari sempurna. Usulan-usulan perbaikan dari pembaca sangat dinantikan.

Tak lupa juga penulis ucapkan banyak terimakasih kepada Dyah Ciptaning LSW, M.M. yang sudah banyak membantu berdiskusi aktif dalam pembuatan buku ini, editor isi dan semua pihak yang sudah membantu dalam membuat buku referensi ini menjadi keren.

Kata Pengantar

Penulis termotivasi menulis buku ini karena beberapa hal. Yang pertama, perluasan lapangan kerja dan pemerataan distribusi pendapatan masyarakat melalui pemerataan kesempatan berusaha, yang dirumuskan dalam RKPD 2018 dengan nama program “Program Pencetakan 5.000 Wirausaha Baru Kota Tasikmalaya”. Kedua, Kebijakan Program Pencetakan 5.000 Wirausaha Baru Kota Tasikmalaya, dilaksanakan selama kurun waktu 5 tahun atau periode RPJMD 2018-2022 dan telah dimulai pada tahun anggaran 2018 dengan berbagai capaian dan persoalan yang telah diselesaikan. Ketiga, memperhatikan data hasil evaluasi atas penyelenggaraan program WUB tahun 2018 dalam berbagai penilaian indikator masih didapatkan kendala yang menjadi faktor yang harus diatasi dalam pencapaian sasaran dan tujuan program dalam RPJMD, di antaranya belum tercapainya target indikator mikro yang meliputi kepesertaan, *talent mapping*, pelatihan dan pemaangan.

Buku ini diawali dengan membahas latar belakang terkait bagaimana wirausaha mampu menciptakan peluang kerja seperti menentukan cara produksi baru, menyusun manajemen operasi untuk mengadakan produk baru sampai bagaimana cara memasarkan dan mengatur modal operasinya. Selanjutnya dibahas bagaimana *role model* kelembagaan alternatif revitalisasi dapat meningkatkan efektivitas WUB dalam pencapaian perluasan lapangan usaha dan peningkatan daya beli masyarakat kota Tasikmalaya dengan ruang lingkup penelitian pada periode pelaksanaan WUB selama satu tahun, pada tahun pelaksanaan 2018.

Buku ini masih jauh dari sempurna. Usulan-usulan perbaikan dari pembaca sangat dinantikan. Pada kesempatan ini penulis juga tidak lupa mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak-pihak yang terkait dalam pembuatan buku referensi ini. Yang pertama dan terutama adalah Allah Swt. yang telah melimpahkan kepada penulis rahmat, hikmat, waktu dan kesempatan bagi penulis.

Tasikmalaya, Desember 2022

Dr Aneu Yulianeu ST.,SE., MM.
Dr. Muhamad Nurdin Yusuf, S.E., M.P.

Langgam Pustaka

Daftar Isi

UCAPAN TERIMA KASIH | v

KATA PENGANTAR | vi

DAFTAR ISI | viii

DAFTAR GAMBAR | ix

DAFTAR TABEL | xi

Bagian Satu: Prolog | 1

Bagian Dua: Wirausaha dan Motivasi | 9

Bagian Tiga: Benchmark Program Wirausaha Baru | 31

Bagian Empat: Implementasi Benchmark Wirausaha Baru:

Case Study Kota Tasikmalaya | 43

Bagian Lima: Epilog | 67

GLOSARIUM | 73

INDEKS | 89

PROFIL PENULIS | 93

Daftar Gambar

- Gambar 3.1 Rasio realisasi permodalan pada program PKT | 40
- Gambar 3.2 Flow distribusi peran
pada gerakan OK OCE Indonesia | 41
- Gambar 4.1 Persentase program WUB dipahami
sebagai program yang baik untuk diikuti | 48
- Gambar 4.2 Persentase topik dalam pelatihan WUB
tercakup dengan lengkap | 48
- Gambar 4.3 Persentase mekanisme program WUB
yang dilaksanakan sesuai harapan | 49
- Gambar 4.4 Persentase pelaksanaan WUB
sesuai *schedule* saat sosialisasi | 50
- Gambar 4.5 Persentase rekrutmen peserta pelatihan | 50
- Gambar 4.6 Persentase waktu pelaksanaan program | 51
- Gambar 4.7 Persentase manfaat dari pelaksanaan *talent mapping* | 51
- Gambar 4.8 Persentase waktu pelaksanaan *talent mapping* | 52
- Gambar 4.9 Persentase konten dalam pelaksanaan *talent mapping* | 53
- Gambar 4.10 Persentase informasi dan
tindak lanjut dari hasil *talent mapping* | 53
- Gambar 4.11 Persentase kemampuan narasumber dalam menjelaskan
hubungan yang kompleks dengan cara yang dapat
dimengerti | 54
- Gambar 4.12 Persentase kemampuan narasumber dalam
menjelaskan berdasarkan permintaan | 55
- Gambar 4.13 Persentase kemampuan narasumber dalam
menggunakan contoh-contoh untuk menggambarkan
konten | 56

- Gambar 4.14 Persentase keaktifan narasumber | 56
- Gambar 4.15 Persentase struktur presentasi yang disampaikan | 57
- Gambar 4.16 Persentase visual presentasi | 58
- Gambar 4.17 Persentase Memberikan inspirasi, rangsangan atau ide-ide baru | 58
- Gambar 4.18 Persentase kegiatan pemagangan sesuai dengan kebutuhan calon wirausaha baru | 59
- Gambar 4.19 Persentase bidang pemagangan sesuai dengan bidang usaha yang anda pilih | 60
- Gambar 4.20 Persentase waktu yang digunakan untuk pelaksanaan pemagangan | 61
- Gambar 4.21 Persentase fungsi pendamping pada saat pemagangan | 61
- Gambar 4.22 Persentase arahan dan bantuan dari tempat magang | 62
- Gambar 4.23 Persentase tenaga pendamping pada kegiatan WUB | 63
- Gambar 4.24 Persentase kompetensi usaha pada tenaga pendamping | 63
- Gambar 4.25 Persentase bantuan tenaga pendamping selama program WUB berjalan | 64
- Gambar 4.26 Persentase fungsi pendamping pada saat pemagangan | 65
- Gambar 4.27 Persentase OPD yang memfasilitasi program WUB | 65

Daftar Tabel

Tabel 1.1 Tujuan Program RPJMD | 4

Tabel 4.1 Pelaksanaan Kegiatan WUB | 46

Langgam Pustaka



BAGIAN SATU: PROLOG

Dr. Aneu Yulianeu, S.T., S.E., M.M.
Dr. Muhamad Nurdin Yusuf, S.E., M.P.

Bagian Satu

Prolog

Kebijakan pembangunan Pemerintah Kota Tasikmalaya di masa Pembangunan Jangka Menengah ke-4 pada RPJMD 2018-2022 dan khususnya pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) 2019.

Didapatkan paket kebijakan program pembangunan ekonomi dengan fokus titik berat perluasan lapangan kerja dan pemerataan distribusi pendapatan masyarakat melalui pemerataan kesempatan berusaha, yang dirumuskan dalam RKPD 2018 dengan nama program “Program Pencetakan 5.000 Wirausaha Baru Kota Tasikmalaya”.

Sebagai pengembangan dan peningkatan program-program sejenisnya yakni program kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil dan menengah serta program pengembangan sistem pendukung usaha bagi usaha kecil dan menengah, dengan mengedepankan pendekatan integratif melingkupi berbagai tahapan; tahap rekrutmen, pelatihan, pemagangan dan aksesibilitas permodalan perbankan, serta pendekatan holistik yang melingkupi berbagai aspek komoditas ekonomi dengan melibatkan peranan *stakeholder* pembangunan kewirausahaan di Kota Tasikmalaya.

Kebijakan Program Pencetakan 5.000 Wirausaha Baru Kota Tasikmalaya, dilaksanakan selama kurun waktu 5 tahun atau periode RPJMD 2018-2022 dan telah dimulai pada tahun anggaran 2018 dengan berbagai capaian dan persoalan yang telah diselesaikan.

Memperhatikan data hasil evaluasi atas penyelenggaraan program WUB tahun 2018 dalam berbagai penilaian indikator masih didapatkan kendala yang menjadi faktor yang harus diatasi dalam pencapaian sasaran dan tujuan program dalam RPJMD, diantaranya:

Tabel 1.1
Tujuan Program RPJMD

Indikator Makro	Target	Capaian
Pencapaian Target Kepesertaan	1.000 orang	1.000 orang
Pencapaian Target <i>Talent Mapping</i>	1.000 orang	857 orang
Pencapaian Target Pelatihan	1.000 orang	757 orang
Pencapaian Pemagangan	1.000 orang	757 orang
Pencapaian Aksesibilitas Permodalan (Ajuan)	1.000 orang	205 orang

Indikator yang membandingkan antara target dan capaian pada tahapan program WUB Tahun 2018 mencitrakan kondisi program yang harus dievaluasi untuk dijadikan kebijakan Pemerintah Kota Tasikmalaya, untuk mengubah penilaian “Kategori Program Belum Produktif” menjadi “Kategori Produktif” sebagaimana tercantum dalam Rekomendasi DPRD Terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Wali Kota Tasikmalaya Tahun 2018, antara lain:

- 1) Pemerintah Kota Tasikmalaya harus secara serius melakukan penciptaan wirausaha baru yang professional dengan dukungan keilmuan (pelatihan, akademis, dan praktis), bantuan modal dan pembinaan yang dilakukan secara berkala dan berkesinambungan agar masyarakat yang telah melaksanakan pelatihan benar-benar membuka usaha;
- 2) pemerintah kota harus intens dalam pembinaan wirausaha, sosialisasi program, pelatihan, bantuan modal, bantuan bahan baku dan yang terpenting adalah bantuan pemasaran yang berdaya saing.

Hal tersebut perlu ditindaklanjuti dengan upaya kajian-kajian untuk menghadirkan kebijakan baru berupa kegiatan yang mampu meminimalkan eksekusi persoalan dan lebih mampu mendorong peningkatan *output* program dan mengungkit pencapaian sasaran dan tujuan dalam RPJMD Kota Tasikmalaya.

Model pengembangan kolaboratif adalah suatu model alternatif pengembangan wirausaha baru Kota Tasikmalaya yang dirancang untuk menyinergikan berbagai *stakeholder* dalam tata laksana program pencetakan wirausaha baru.

Tumbuhnya wirausaha sejatinya menjadi perhatian seluruh pihak karena pertumbuhan wirausaha diyakini dapat mendorong perekonomian suatu daerah bahkan negara. Tumbuhnya wirausaha atau entitas bisnis baru juga diyakini menjadi solusi bagi perluasan lapangan kerja dan terserapnya tenaga kerja yang akan mendorong pada peningkatan daya beli masyarakat.

Model ini dirancang untuk tidak melakukan perubahan yang “signifikan” terhadap model yang telah dikembangkan oleh Pemerintah Kota Tasikmalaya. Sebagaimana diketahui bersama, bahwasanya perubahan aturan atau kebijakan di institusi pemerintah prosesnya tidaklah sesederhana seperti yang dilakukan di institusi swasta. Dengan mempertimbangkan bahwa program Pencetakan 5.000 Wirausaha Baru ini sampai tahun 2022 dimana hanya tersisa efektif 2 tahun berjalan (2021-2022) dikarenakan anggaran pelaksanaan tahun 2020 telah diputuskan dengan melaksanakan skema atau tata laksana dengan apa yang sudah berjalan di tahun 2018 dan tahun 2019.

Waktu yang tidak banyak ini yaitu 2 tahun, tampaknya akan kurang efektif dan efisien jika melakukan perubahan yang signifikan terhadap aturan dan kebijakan yang ada. Dengan demikian, alternatif dengan model kerja sama kolaborasi dengan berbagai pihak dipandang rasional.

Penelitian tentang *Role Model* Kelembagaan Alternatif Revitalisasi Program WUB Kota Tasikmalaya bertujuan untuk meningkatkan efektifitas program WUB di Kota Tasikmalaya dalam tujuan penca-

paian perluasan lapangan usaha dan peningkatan daya beli masyarakat Kota Tasikmalaya.

Maksud dilaksanakan kegiatan tersebut adalah menjamin kesinambungan dan konsistensi kegiatan-kegiatan integratif, serta sebagai bahan evaluasi kegiatan/program Wirausaha Baru (WUB) yang telah dicanangkan untuk masa periode 2018-2022.

Dengan hasil yang diharapkan dalam penelitian ini adalah:

- 1) menjamin bahwa pelaksanaan program Wirausaha Baru (WUB) sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ditetapkan;
- 2) mengevaluasi perkembangan Program Wirausaha Baru (WUB) tahun anggaran 2018;
- 3) mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin.

Metodologi kajian ini dilakukan dengan melakukan pengumpulan data langsung dengan cara wawancara kepada *stakeholder* terkait yang terlibat dalam kegiatan atau program WUB yang berasal dari *staff* dinas pelaksana kegiatan, para pendamping program WUB serta peserta program WUB tahun 2018.

Di samping melakukan wawancara langsung, pengumpulan data juga dilakukan dengan penyebaran *questionnaire* melalui *link* yang dikirimkan melalui media WhatsApp kepada para peserta WUB.

Di mana *link* tersebut berisi formulir digital yang dapat mereka isi dan hasilnya langsung terhubung ke sistem atau *database* pengolahan dan atau menyusun kajian.

Dengan ruang lingkup kajian adalah sebagai berikut:

- 1) pelaksanaan penelitian dimaksud adalah pada periode evaluasi pelaksanaan program WUB selama 1 (satu) tahun; tahun pelaksanaan 2018;
- 2) penelitian dilaksanakan melalui *monitoring* dan evaluasi kegiatan program Wirausaha Baru (WUB) periode tahun 2018.

Pada model pengembangan ini, tata laksana kegiatan sebagian besar melaksanakan apa yang sudah dilaksanakan oleh pemerintah kota dalam kurun waktu tahun 2018 hingga 2019. Namun terdapat perbedaan dari institusi atau lembaga pelaksana kegiatan yang diintegrasikan dengan lembaga lain atau penggabungan antara beberapa lembaga. Peran-peran pada tiap tahapan dibagi berdasarkan kompetensi setiap institusi dengan jaminan ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang menangani kegiatan tersebut. Sehingga seluruh tahapan atau rangkaian kegiatan pada program dapat terlaksana dengan baik.

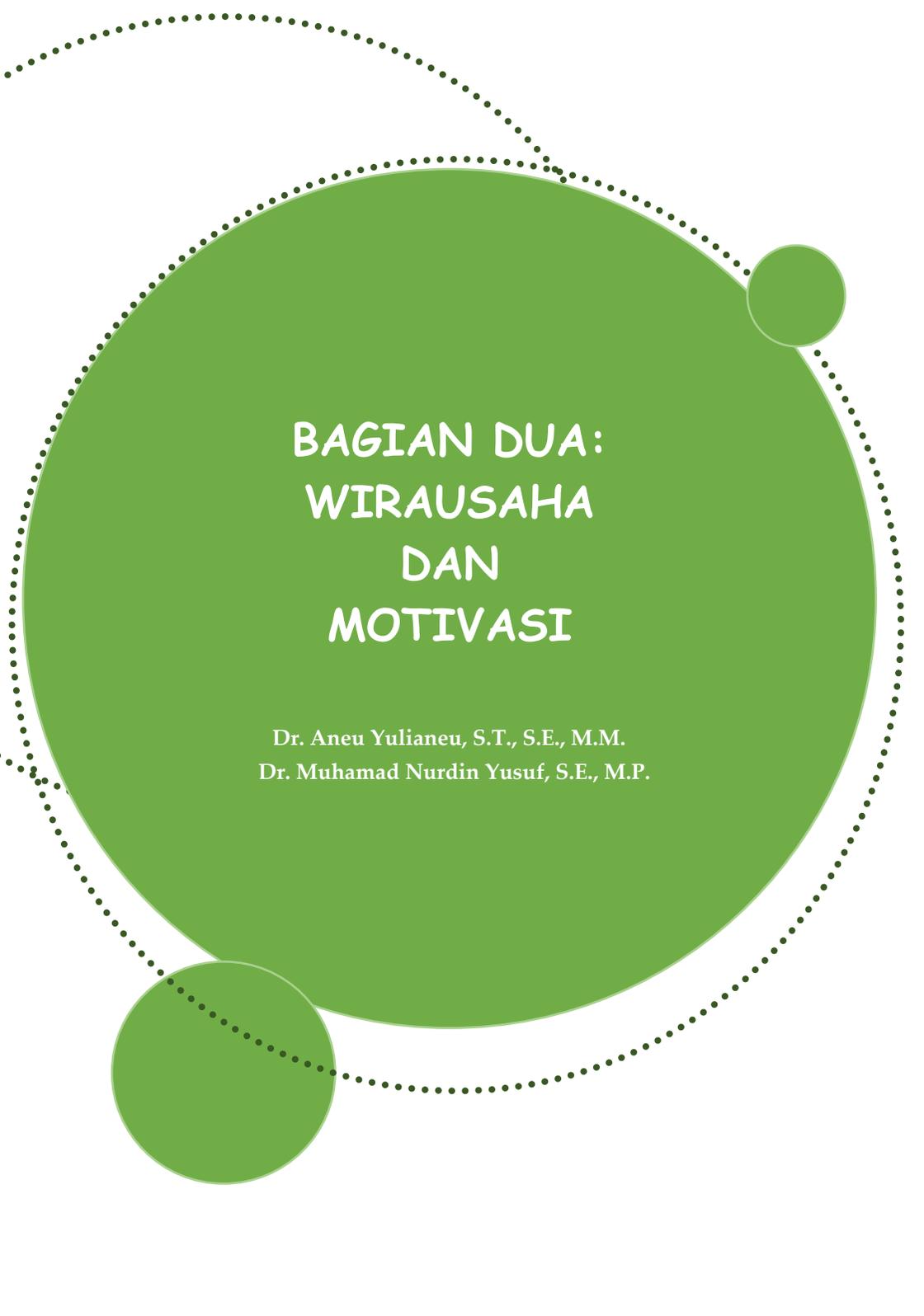
Tahapan rekrutmen peserta dipusatkan di tingkat kelurahan dan kecamatan. Hal ini mempertimbangkan aspek jarak para calon peserta WUB yang berminat mendaftar tampaknya akan lebih dekat ke kantor kelurahan dan atau kecamatan tempat mereka tinggal. Hal ini akan mereduksi biaya transportasi dan mobilisasi para calon peserta yang sejauh dalam hasil survei di tahun 2018 dan tahun 2019 bahwa biaya transportasi dan mobilisasi calon peserta dalam proses pendaftaran dan seleksi menjadi beban tersendiri bagi para calon peserta.

Pihak kelurahan dan kecamatan berperan melakukan seleksi administrasi calon peserta WUB, dimana jika kelengkapan dokumen calon peserta telah memenuhi syarat sesuai aturan yang tertuang di Perwalkot nomor 21 tahun 2017 maka pihak kelurahan bersama dengan kecamatan dapat memutuskan calon peserta yang lolos seleksi administrasi. Adapun syarat kelengkapan dokumen adalah sbb:

- 1) salinan kartu tanda penduduk;
- 2) salinan ijazah paling rendah sekolah menengah pertama atau yang sederajat;
- 3) surat keterangan sehat dari rumah sakit milik pemerintah atau pusat kesehatan masyarakat;
- 4) surat keterangan catatan kepolisian; dan
- 5) surat pernyataan bersedia mengikuti seluruh tahapan program WUB, pernyataan minat usaha dan bidang usaha yang diminati.

Setelah calon peserta WUB dinyatakan lolos oleh pihak kecamatan maka tahapan selanjutnya adalah mengikuti wawancara yang akan dilakukan oleh pihak OPD terkait sesuai dengan bidang peminatan yang diminati oleh calon peserta WUB. Proses dan lokasi wawancara dilaksanakan di kantor kecamatan. Hal ini juga dengan mengambil pertimbangan pengurangan beban biaya transportasi dan mobilisasi para calon peserta WUB.

Selanjutnya dari hasil proses seleksi administrasi dan wawancara, pihak perangkat daerah mengumumkan calon peserta yang lolos dan berhak mengikuti program Wirausaha Baru di OPD terkait. Pengumuman ini dituangkan dalam Surat Keputusan (SK) Perangkat Daerah yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah, dicetak pada lembaran kertas resmi dan dipublikasikan di kantor kecamatan-kecamatan. Inti kolaboratif yang didapati dalam tahapan ini adalah pola kerja sama tim yang dibangun antara kelurahan, kecamatan dan OPD terkait.



BAGIAN DUA: WIRAUSAHA DAN MOTIVASI

Dr. Aneu Yulianeu, S.T., S.E., M.M.
Dr. Muhamad Nurdin Yusuf, S.E., M.P.

Bagian Dua

Wirausaha dan Motivasi

Perlu disepakati terlebih dahulu apa yang dimaksud wirausaha. Karena terdapat referensi yang mendefinisikan kata “wirausaha”. Dengan demikian, kita harus mencari acuan terhadap definisi mana yang akan kita tentukan untuk menjadi dasar dari pengertian wirausaha ini. Sehingga, program pencetakan 5,000 wirausaha baru yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Tasikmalaya mulai tahun 2018-2022 dapat disusun menjadi konsep dan *design* program yang *compatible* dengan situasi dan kondisi yang dimiliki oleh Kota Tasikmalaya.

Kira-kira apakah makna dari wirausahawan sebenarnya? Benarkah wirausahawan adalah penjual? Mari kita pahami terlebih dahulu mengenai arti wirausaha dan kewirausahaan. Wirausaha memiliki arti secara umum yaitu kegiatan usaha yang dilakukan oleh seseorang secara mandiri dengan tujuan menghasilkan barang atau jasa. Kewirausahaan sendiri merupakan materi atau pembahasan mengenai wirausaha dan wirausahawan, atau mengenai penerapan keinovasian dan kreativitas seseorang dalam melakukan wirausaha sehingga dapat memecahkan masalah dan dapat bermanfaat sebagai peluang wirausahawan. Dalam kewirausahaan terdapat tiga teori utama, yaitu:

- 1) Neo Klasik → Teori yang memandang perusahaan sebagai teknologis, dimana manajemen perusahaan hanya untuk mengetahui biaya;
- 2) Kirzerian *Entrepreneur* → Teori Kirzer ini mengenai kinerja manusia, kesungguhan manusia, keseriusan manusia, untuk bekerja mandiri. Yang menyimpulkan bahwa kemajuan atau kegagalan usaha tergantung pada pengusahanya;

- 3) Teori Perilaku → Teori tentang bagaimana seorang wirausahawan memiliki kecakapan dalam pengorganisasian usahanya, meliputi pengaturan keuangan, pembangunan jaringan, dan pemasaran produk baru yang diciptakan.

Wirausahawan atau dalam bahasa Inggris dikenal dengan *entrepreneur* adalah orang yang melakukan aktivitas atau mengelola wirausaha seperti; menentukan cara produksi baru, menyusun manajemen operasi untuk pengadaan produk baru, cara memasarkan serta mengatur permodalan operasinya. Wirausaha harus memiliki kepandaian atau memiliki bakat mengenali produk baru yang akan dikembangkan. Jadi, wirausahawan bukanlah penjual namun wirausahawan adalah pencipta kegiatan usaha.

Sekarang siapakah yang dimaksud dengan wirausahawan? Wirausahawan adalah penemu, orang-orang yang menemukan ide inovatif dalam berwirausaha, bukan dengan menjual produk yang sudah ada atau mencontoh produk yang ada.

Mereka yang tidak memikirkan kesuksesan dari segi akademiknya, wirausahawan bisa berasal dari orang yang tidak lulus sekolah, namun mereka memiliki pemikiran yang luar biasa. Orientasi mereka adalah uang, sumber daya terbesar adalah uang. Namun tidak menjadikan uang sebagai tujuan akhir.

Mereka yang memiliki keberuntungan dalam segi apapun, adanya keuntungan yang didapatkan Wirausahawan adalah mereka yang pemberani dalam menentang risiko. Mereka tidak takut akan gagal. Namun, mereka bekerja dengan keras untuk membuat perencanaan yang bisa meminimalisir kegagalan.

Wirausahawan juga memiliki ciri-ciri dan mungkin belum banyak yang tahu akan ciri-ciri yang dimiliki wirausahawan tersebut. Ciri-ciri tersebut diantaranya:

- 1) memiliki keberanian dalam mengambil keputusan serta risiko;
- 2) mempunyai daya kreasi serta inovasi tinggi;
- 3) dapat berfikir jangka panjang untuk masa depan;

- 4) memiliki jiwa kepemimpinan;
- 5) memiliki semangat serta kemauan yang keras;
- 6) dapat menganalisis dengan tepat;
- 7) memiliki sifat hemat atau tidak konsumtif.

Kelebihan yang biasanya akan dimiliki atau diperoleh seseorang ketika memulai berwirausaha, yaitu:

- 1) kesempatan untuk menggapai atau mewujudkan cita-cita;
- 2) banyak memiliki kesempatan mengembangkan ide-idenya;
- 3) memiliki kesempatan menunjukkan potensi diri;
- 4) mendapat pengakuan atas usaha yang dimiliki;
- 5) bisa mendapatkan keuntungan yang fantastis;
- 6) berkontribusi pada masyarakat;
- 7) bebas melakukan apa yang diinginkan namun tidak melupakan aturan.

Namun demikian di balik kelebihan yang akan didapat, berwirausaha juga memiliki kekurangan, antara lain:

- 1) ketidakpastian pendapatan;
- 2) tidak adanya jaminan dalam bertahan hidup;
- 3) risiko terjadi kegagalan dalam berwirausaha;
- 4) jam kerja yang tidak produktif;
- 5) kualitas hidup yang tidak pasti hingga usaha yang didirikan mencapai keberhasilan;
- 6) merasa sendiri ketika ingin mengembangkan ide-idenya;
- 7) tanggung jawab yang lebih berat.

Sesuai dengan pengertian wirausahawan diatas, wirausahawan harus mampu mengelola aktivitas usahanya sendiri atau mandiri, dengan dibarengi sikap-sikap berikut ini:

- 1) bersikap penuh tanggung jawab atas segala risiko yang dihadapi, wirausahawan perlu mempertimbangkan dengan matang keputusan yang akan diambil untuk meminimalisir risiko ke depannya;

- 2) bersikap percaya diri atas keyakinan kepada kemampuan diri sendiri dalam mencapai keberhasilan;
- 3) *enerjik* dalam beraktivitas di segala bidang wirausaha;
- 4) berorientasi pada masa depan atau tidak terlalu memikirkan masa lalu, namun bukan berarti tidak belajar atas kesalahan di masa lalu;
- 5) memiliki sikap kepemimpinan dalam pengelolaan organisasinya;
- 6) nilai prestasi yang diimpikan adalah uang atau hasil yang mencapai target.

Seringkali seseorang yang sedang memulai wirausaha lupa perlunya hal-hal berikut ini:

1. Menggali Potensi

Setiap individu memiliki karakter, potensi, bakat yang berbeda, dalam memulai wirausaha, seseorang perlu menggali potensi yang ada pada diri masing-masing. Jangan hanya berorientasi dengan usaha apa yang sedang naik daun namun melupakan bisa tidaknya kita dalam mengelolanya.

Potensi diri menjadi faktor pengembangan usaha yang akan dilakukan, karena ketika seseorang sudah mengetahui apa bakatnya, di mana potensinya, maka dalam menjalankan usaha akan lebih mudah dan cepat berkembang.

Wirausahawan perlu memiliki enam karakter utama yaitu:

- a) *Focus*. Berfokus pada satu usaha yang memiliki dampak positif paling besar.
- b) *Advantage*. Keuntungan yang menjadi target wirausaha.
- c) *Creativity*. Memiliki pemikiran yang kreatif dalam pengenalan produk serta persaingan pasar.
- d) *Ego*. Pandai mengatur ego sendiri, bagaimana menyikapi masalah dan sebagainya.
- e) *Team*. Dalam berwirausaha tetap diperlukannya kerja sama tim yang struktural untuk menunjang pengelolaan usaha.

f) *Social*. Diperlukannya jiwa sosial agar produk yang dibuat dapat dengan mudah diterima masyarakat luas.

2. Memulai Usaha

Terdapat empat kategori untuk menjadi wirausahawan, yaitu:

- a) Penemu → Menjadi otak pemikir dalam berwirausaha, meliputi konsep, dan metodologi.
- b) Inovator → Memecahkan masalah baru, pengembangan teknologi baru.
- c) Marketer → Menganalisis serta mengidentifikasi kebutuhan pasar serta mengelola agar produk baru memenuhi pasar atau produk substitusi lebih efisien.
- d) Oportunis → Menyesuaikan antara kebutuhan serta jasa yang akan diperoleh.

3. Kemampuan yang Diperlukan

Keterampilan yang dibutuhkan wirausahawan biasanya dikelompokkan menjadi tiga, yaitu:

- a) teknis seperti menulis, mendengar, presentasi, pembinaan pengorganisasian, bekerja sama;
- b) manajemen, yaitu memulai, pengembangan, serta pengelolaan perusahaan seperti, membuat keputusan, memasarkan, pengelolaan keuangan, produksi dan sebagainya;
- c) kewirausahaan, keterampilan ini seperti kedisiplinan, pengambilan risiko, pemikiran inovatif, jiwa kepemimpinan dan orientasi perubahan.

Wirausahawan yang sedang memulai usaha akan sering mengalami kesalahan pengelolaan, mulai dari pengelolaan bahan baku, personalia, daya penawaran, pengontrolan keuangan hingga membangun kepercayaan konsumen.

Sering kali, perencanaan yang kurang begitu meyakinkan sudah dilaksanakan, sehingga mengakibatkan kurangnya pengembangan pe-

rencanaan ketika terjadi masalah diluar perkiraan. Penentuan lokasi juga sering menjadi penghambat kemajuan pertumbuhan usahanya, selain kurangnya wawasan dalam menganalisis daya beli konsumen yang ada di sekitarnya, wirausahawan pemula juga kurang teliti masalah penawaran serta persaingan yang ada.

Seorang yang akan memulai berwirausaha terlebih dahulu perlu mempelajari masalah perencanaan hingga pengelolaan hasil, menambah wawasan mengenai pencarian distributor yang saling menguntungkan, penawaran, persaingan, dan pencarian karyawan yang juga paham akan usaha yang akan dikelola, sehingga memudahkan pelaksanaan dan mencapai target sasaran. Setelah, segala perencanaan sudah benar-benar matang dan sarana prasarana sudah tersedia mulailah melaksanakan usaha sesuai rencana, gunakan pengelolaan keuangan yang tepat, dan pengelolaan sumber daya manusia yang lebih efektif. Dan, mulailah membangun jaringan kerja sama yang menguntungkan dengan sikap kehati-hatian, pikirkan terlebih dahulu apapun keputusan yang akan ditetapkan.

Memasuki era revolusi industri 4.0 pengertian wirausaha juga banyak direlevansikan dengan “istilah baru” yang dinamakan “*start-up*”. Tentu saja, kita semua tidak dapat apatis dengan perkembangan teknologi digital yang tidak dapat kita “tolak” perkembangannya dan mulai masuk ke berbagai lini kehidupan kita sehari-hari termasuk dalam pengembangan dunia usaha.

Mari kita analisa bersama apakah yang dimaksud *start-up* dan di bagian manakah kira-kira perbedaannya dengan wirausaha atau wirausahawan.

Barangkali masih banyak orang yang belum familier dengan istilah *start-up*. Kata *start-up* sendiri merupakan serapan dari bahasa Inggris yang berarti tindakan atau proses memulai sebuah organisasi baru atau usaha bisnis.

Start-up adalah sebuah perusahaan rintisan, atau perusahaan yang belum lama beroperasi. *Start-up* adalah institusi manusia yang dirancang untuk menciptakan produk atau jasa di tengah ketidakpastian

yang ekstrem (Ries, 2011). *Start-up* dirancang untuk menemukan sebuah model bisnis yang dapat berulang dan berskala (Blank, 2014). Dari definisi tersebut dapat diartikan *start-up* adalah sebuah perusahaan rintisan yang dirancang untuk menemukan model bisnis yang tepat untuk perusahaannya agar dapat bertahan di tengah ketidakpastian yang ekstrem. Bill Gross melakukan riset dengan melakukan analisis 200 *start-up* yang sukses dan gagal dari *start-up* yang berada di dalam idealab dan beberapa *start-up* di luar idealab seperti Uber, AirBnb, YouTube, dan lainnya, mengungkapkan ada 5 faktor yang menentukan kesuksesan sebuah *start-up*. Kelima faktor tersebut adalah *timing*, *team*, *idea*, *bisnis model*, dan *funding* (www.inc.com, 2017). Dari 200 *start-up* tersebut, 42 persen kesuksesan mereka dipengaruhi oleh faktor *timing* yang tepat. Kemudian diikuti oleh faktor *team* sebanyak 32 persen, *idea* 28 persen, *bisnis model* 24 persen dan *funding* 14 persen.

Pengertian *start-up* di atas mungkin lebih pada terminologinya, namun akan lebih mudah jika istilah *start-up* diartikan sebagai perusahaan baru yang sedang dikembangkan. Mulai berkembang di akhir tahun 90-an hingga tahun 2000, nyatanya istilah *start-up* banyak “dikawinkan” dengan segala yang berbau teknologi, web, internet dan yang berhubungan dengan ranah tersebut.

Jika kembali melihat ke belakang, ternyata penggunaan istilah *start-up* pada hal-hal yang berhubungan dengan teknologi, website, internet, dan lainnya, terjadi dikarenakan istilah *Start-up* sendiri mulai populer secara internasional pada masa *buble dot-com*.

Lalu apa yang dimaksud *buble dot-com* itu? Fenomena *buble dot-com* adalah ketika pada periode tersebut (1998-2000) banyak perusahaan *dot-com* didirikan secara bersamaan. Pada masa itu sedang gencar-gencarnya perusahaan membuka website pribadinya. Semakin banyak orang yang mengenal internet sebagai ladang baru untuk memulai bisnisnya. Dan waktu itu pula lah, *Start-up* lahir dan berkembang.

Namun menurut Ronald Widha dari TemanMacet.com, *Start-up* tidak hanya perusahaan baru yang bersentuhan dengan teknologi, dua-nia maya, aplikasi atau produk tetapi bisa juga mengenai jasa dan ge-

rakan ekonomi rakyat akar rumput yang bisa mandiri tanpa bantuan korporasi-korporasi yang lebih besar dan mapan.

Karakteristik dari sebuah perusahaan yang dapat digolongkan sebuah *start-up*. Beberapa karakteristik perusahaan *start-up* tersebut di antaranya:

- 1) usia perusahaan kurang dari 3 tahun;
- 2) jumlah pegawai kurang dari 20 orang;
- 3) pendapatan kurang dari \$ 100.000/tahun;
- 4) masih dalam tahap berkembang;
- 5) umumnya beroperasi dalam bidang teknologi;
- 6) produk yang dibuat berupa aplikasi dalam bentuk digital;
- 7) biasanya beroperasi melalui *website*.

Dari karakteristik tersebut mungkin tampak bahwa *start-up* lebih condong ke perusahaan yang bergerak di bidang teknologi dan web. Namun faktanya memang seperti itu, kini perkembangan perusahaan yang lazim dilabeli nama *start-up* adalah perusahaan yang berkenaan dengan bidang teknologi dan *online*.

Perkembangan bisnis *start-up* di Indonesia bisa dikatakan cukup pesat dan menggembirakan. Setiap tahun bahkan setiap bulan banyak *founder* (pemilik) *start-up* baru bermunculan. Menurut *dailysocial.net*, sekarang ini terdapat setidaknya lebih dari 1500 *start-up* lokal yang ada di Indonesia. Potensi pengguna internet Indonesia yang semakin naik dari tahun ke tahun tentunya merupakan suatu lahan basah untuk mendirikan sebuah *start-up*.

Berdasarkan beberapa riset, pada tahun 2013 saja diperkirakan pengguna internet di Indonesia mencapai 70 juta orang, bisa dibayangkan berapa jumlah *user* internet Indonesia beberapa tahun ke depan. Selain itu daya beli masyarakat yang meningkat seiring dengan naiknya pendapatan per kapita masyarakat negeri ini ikut mempengaruhi perkembangan industri digital.

Menurut Rama Mamuaya, CEO *dailysocial.net*, *start-up* di Indonesia digolongkan dalam tiga kelompok yaitu:

- 1) *start-up* pencipta game;
- 2) *start-up* aplikasi edukasi;
- 3) *start-up* perdagangan seperti *e-commerce* dan informasi.

Menurutnya *start-up* game dan aplikasi edukasi punya pasar yang potensial dan terbuka di Indonesia. Hal ini dikarenakan proses pembuatan game dan aplikasi edukasi relatif mudah. Dengan berkembangnya media sosial dan *smartphone*, pasar untuk *mobile game* dan *social game* semakin besar.

Sementara itu untuk aplikasi atau website yang bergerak di bidang *e-commerce* dan informasi. Tantangan *e-commerce* di Indonesia masih cukup besar dikarenakan masih minimnya penggunaan kartu kredit. Namun untuk yang berbau informasi atau berita berbagai tema, perkembangannya justru jauh lebih pesat lagi.

Di Indonesia sekarang ini telah banyak berdiri komunitas *founder-founder start-up*, diantaranya adalah;

- 1) Bandung Digital Valley (bandungdigitalvalley.com);
- 2) Jogja Digital Valley (jogjadigitalvalley.com);
- 3) Ikitas (www.ikitas.com) Inkubator Bisnis di Semarang;
- 4) Stasiun (stasiun.org) wadah bagi *start-up* lokal kota Malang;
- 5) dan masih banyak lagi yang lainnya.

Dengan adanya komunitas ini tentunya akan memudahkan para *founder* untuk saling *sharing*, membimbing bahkan menjaring investor. Para *founder* dapat pula mengikuti kompetisi yang diadakan oleh beberapa perusahaan seperti Telkom untuk menjadi investor mereka.

Hal yang paling utama untuk mendirikan *start-up* adalah tim yang solid, karena dengan adanya tim yang solid bisa memunculkan ide-ide baru yang kreatif dan inovatif.

Dengan ide dan eksekusi yang tepat, tentunya para *founder* tidak akan kesulitan menarik minat masyarakat maupun mencari investor.

Dalam sebuah wawancara yang dilakukan oleh wartawan Warta Ekonomi kepada Molly Nagler (*Start-up* Mentor di Silicon Valley),

Molly mengatakan bahwa hampir semua *start-up* gagal, namun kegagalan itu tidak harus dipandang sebagai sesuatu yang negatif karena masih banyak sisi positif di dalamnya.

Maksudnya adalah jika *founder start-up* gagal saat melakukan eksekusi maka ia berkesempatan untuk belajar sesuatu yang baru dan ilmu baru, seperti konsep *trial and error* pada umumnya. *Start-up-start-up* lokal yang kini sudah mencetak sukses di dunia maya di antaranya Kaskus dan Urbanesia.

Kemudian apa perbedaan *start-up* dengan *online shop* atau bisnis *online*? Penerapan dunia teknologi, terutama internet di dunia bisnis membuat siapa pun dapat membuat sebuah bisnis dengan mudah & cepat.

Apalagi beberapa tahun belakangan ini, Indonesia masuk ke dalam euforia '*start-up*' dimana para *entrepreneur-entrepreneur* muda menciptakan bisnis '*start-up*' yang memiliki inovasi & kreativitas tanpa batas. Kata '*start-up*' pun menjadi sangat familier di dunia *entrepreneur*.

Saat ini, definisi arti dari *start-up* relevansi lebih kepada sebuah usaha yang baru berjalan dan menerapkan inovasi teknologi untuk menjalankan *core business*-nya & memecahkan sebuah masalah di masyarakat. Sehingga memiliki sifat '*disruptive*' di dalam sebuah pasar/ industri yang sudah ada atau bahkan menciptakan sebuah industri baru.

Perkembangan dunia *start-up* di Indonesia semakin bergairah & semakin tumbuh seiring dengan berkembangnya teknologi. Setidaknya telah ada 4 *start-up unicorn* yang berasal dari Indonesia, yaitu Traveloka, Tokopedia, Bukalapak & GO-JEK.

Berdasarkan data dari Tech In Asia menunjukkan jika pada kuartal 2, tahun 2017, *start-up* yang mendominasi di Indonesia berasal dari industri *E-Commerce & Fintech*. Walaupun menurut statistik mengalami penurunan jumlah *start-up* baru pada tahun 2017, namun memiliki kenaikan dalam hal jumlah pendanaan untuk pendanaan program akselerator *start-up* di tahun 2017.

Hal ini juga memberikan hal yang positif bagi Indonesia, yaitu kepercayaan dari investor sudah mulai terlihat untuk melihat & mendanai *start-up-start-up* di Indonesia dan juga menilai jika *start-up-start-up* Indonesia memiliki potensi layaknya perkembangan teknologi di Amerika Serikat & China.

Contoh Studi Kasus

Jika saat ini ada yang mendirikan perusahaan taksi konvensional, *apakah bisa disebut start-up?* Jawabannya tidak, jika mengartikan definisi *start-up* saat ini. Kenapa tidak disebut *start-up*? Karena tidak menerapkan inovasi teknologi untuk menjalankan *core business* nya alias masih dengan cara konvensional. Walaupun perusahaan taksi konvensional tersebut berumur dibawah 5 tahun.

Tetapi lainnya hal dengan perusahaan taksi *online*. Mereka disebut sebagai *start-up* karena menggunakan inovasi teknologi untuk menjalankan *core business* mereka. Dan mereka pun bersifat *disruptive*. Dapat dilihat dari *behaviour* masyarakat yang sekarang semakin mengandalkan transportasi *online* dan mengubah peta permainan di dunia transportasi secara cepat.

Karena euforia *start-up* yang begitu besar, masih banyak yang mengartikan & mendefinisikan sebuah *online shop* atau bisnis *online* alias serba *‘.com’* bisa disebut sebagai *start-up*. Namun kenyataan hal tersebut adalah salah. Tentu sebuah *start-up* & *online shop* sangatlah berbeda. Walaupun banyak *online shop* atau bisnis *online* menggunakan *‘.com’* ataupun *‘website’*, tetapi bukan berarti bisa disebut *start-up* lho.

Menurut Forbes, definisi makna *start-up* juga mengandung ‘memecahkan masalah’ yang ada di masyarakat. Seperti transportasi *online* yang menjadi solusi di masyarakat untuk memesan transportasi cepat, aman & nyaman. Jika hanya sekedar *online shop* ataupun perusahaan yang memiliki website *‘.com’* untuk informasi perusahaan atau produk saja, bukan disebut sebagai *start-up*.

Motivasi Wirausaha Baru

Merujuk kepada Peraturan Walikota Tasikmalaya nomor 21 tahun 2017 tentang Pedoman Umum Pencetakan Wirausaha Baru Kota Tasikmalaya. Model dan konsep pengembangan program WUB di Kota Tasikmalaya dilaksanakan dengan gambaran sebagaimana dipaparkan berikut ini.

Sasaran program WUB adalah penduduk Kota Tasikmalaya yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- 1) usia 18 (delapan belas) tahun sampai dengan 45 (empat puluh lima) tahun;
- 2) pendidikan paling rendah sekolah menengah pertama atau yang sederajat;
- 3) sehat jasmani dan rohani;
- 4) berkelakuan baik;
- 5) bersedia mengikuti seluruh tahapan program WUB; dan
- 6) mempunyai minat usaha.

Pemerintah Daerah melalui program WUB merencanakan terbentuknya paling kurang 5.000 (lima ribu) WUB untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022.

Program WUB dilaksanakan oleh perangkat daerah sesuai tugas dan fungsinya. Untuk tahun 2018 ditetapkan sebagai berikut:

- 1) perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah, perindustrian dan perdagangan, dengan target sebanyak 400 (empat ratus) WUB;
- 2) perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian dan perikanan, dengan target sebanyak 300 (tiga ratus) WUB;
- 3) perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepemudaan, olah raga, kebudayaan dan pariwisata, dengan target sebanyak 100 (seratus) WUB;

- 4) perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang tenaga kerja, dengan target sebanyak 100 (seratus) WUB; dan
- 5) perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, dengan target sebanyak 100 (seratus) WUB.

Proses pendaftaran atau dikenal juga dengan “rekrutmen peserta” pada program WUB merupakan bagian dari tahapan proses seleksi untuk mendapatkan calon peserta program WUB. Perangkat daerah yang telah diberi tugas sesuai amanat Perwalkot, menyelenggarakan pendaftaran calon peserta program WUB. Pendaftaran dilaksanakan melalui pengumuman secara terbuka, baik media cetak, media elektronik atau media lainnya yang dapat diketahui oleh publik.

Setiap orang yang berminat untuk menjadi calon peserta program WUB, wajib mendaftar dengan mengajukan permohonan secara tertulis kepada kepala perangkat daerah dilampiri dokumen-dokumen antara lain:

- 1) salinan kartu tanda penduduk;
- 2) salinan ijazah paling rendah sekolah menengah pertama atau yang sederajat;
- 3) surat keterangan sehat dari rumah sakit milik pemerintah atau pusat kesehatan masyarakat;
- 4) surat keterangan catatan kepolisian; dan
- 5) surat pernyataan bersedia mengikuti seluruh tahapan program WUB, pernyataan minat usaha dan bidang usaha yang diminati.

Seleksi calon peserta program WUB terdiri dari seleksi administrasi; dan wawancara. Seleksi administrasi meliputi penelitian terhadap kelengkapan dokumen yang diajukan calon peserta program WUB. Kelengkapan dokumen. Pada seleksi wawancara meliputi penelitian dan penilaian terhadap minat dan bidang usaha yang diminati.

Untuk bobot nilai seleksi calon peserta program WUB ditetapkan dengan komposisi 40% (empat puluh persen) untuk seleksi administrasi dan 60% (enam puluh persen) untuk wawancara.

Kepala perangkat daerah memberitahukan kepada peserta program WUB yang telah ditetapkan, mengenai waktu dimulainya program WUB disertai dengan informasi berkenaan dengan kewajiban yang bersangkutan untuk melapor/mendaftar.

Peserta program WUB yang tidak melapor/mendaftar dalam batas waktu yang telah ditentukan, dinyatakan gugur dan akan diganti oleh peserta yang lain. Peserta program WUB yang telah melapor/mendaftar berhak mengikuti program WUB.

Jika terdapat peserta program WUB yang dinyatakan gugur dan oleh karenanya diperlukan penggantian peserta program WUB, maka kepala perangkat daerah menerbitkan Keputusan Kepala Perangkat Daerah mengenai perubahan calon peserta program WUB yang telah dinyatakan lulus seleksi.

Calon peserta yang telah dinyatakan lulus seleksi dan melapor/mendaftar selanjutnya ditetapkan sebagai peserta program WUB dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah. Peserta program WUB yang tidak mengikuti tahapan program WUB, dapat diberhentikan oleh kepala perangkat daerah, baik atas permintaan sendiri atau tidak atas permintaan sendiri. Pemberhentian ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah.

Pemetaan minat dan bakat merupakan tahapan pemilahan minat dan bakat potensi kewirausahaan. Kepala perangkat daerah melaksanakan pemetaan minat dan bakat calon peserta program WUB dengan dibantu oleh fasilitator.

Pemetaan minat dan bakat diarahkan untuk pengelompokan pelatihan dan pemagangan yang akan diikuti oleh peserta program WUB. Pemetaan minat dan bakat meliputi pengumpulan data kepribadian (*profiling*); dan wawancara

Selanjutnya perangkat daerah menyelenggarakan pelatihan kewirausahaan. Pelatihan kewirausahaan dapat melibatkan narasumber, yang terdiri dari tenaga yang berkompeten dan atau pelaku usaha.

Pelatihan kewirausahaan diselenggarakan dengan ketentuan bahwa materi teknis berdasarkan bidang/ sektor wirausaha sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan oleh kepala perangkat daerah, jangka waktu pelatihan disesuaikan dengan jenis pelatihan dan metode pelatihan dan cara pembelajaran kewirausahaan disesuaikan dengan jenis pelatihan.

Setelah melalui tahap pelatihan kewirausahaan, perangkat daerah memfasilitasi praktik magang kewirausahaan bagi peserta program WUB. Fasilitasi perangkat daerah meliputi penyediaan sarana dan prasarana penunjang yang disesuaikan dengan kebutuhan, penetapan perusahaan tempat magang, dan pendampingan peserta magang.

Penetapan perusahaan tempat magang ditindaklanjuti dengan perjanjian kerja sama antara kepala perangkat daerah dengan pemilik/pimpinan perusahaan, yang memuat beberapa hal antara lain ruang lingkup, hak dan kewajiban, jangka waktu, dan pembiayaan. Magang kewirausahaan merupakan syarat untuk mendapatkan sertifikat kepesertaan program WUB.

Pendampingan dalam program WUB dilaksanakan sebagai bentuk pembimbingan teknis kewirausahaan secara langsung oleh tenaga pendamping kepada peserta program WUB. Pendampingan dilaksanakan dalam tahapan program WUB yang meliputi kegiatan:

- 1) pelatihan;
- 2) magang;
- 3) penyusunan rencana usaha;
- 4) kemajuan pemanfaatan fasilitas pembiayaan modal usaha;
- 5) kemajuan pemanfaatan subsidi; dan
- 6) pelaporan kemajuan usaha. Tenaga pendamping melaporkan kemajuan dan kemampuan setiap peserta program WUB kepada kepala perangkat daerah setiap bulan.

Untuk kelancaran penyelenggaraan program WUB, dibentuk tim koordinasi program WUB yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota. Tim koordinasi mempunyai tugas sebagai berikut:

- 1) mengoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi serta tindak lanjut seluruh kegiatan dalam program WUB; dan
- 2) melaporkan semua kegiatan program WUB kepada wali kota.

Keanggotaan tim koordinasi program WUB terdiri dari:

- 1) unsur perangkat daerah; dan
- 2) unsur dunia usaha.

Sekretariat tim koordinasi program WUB berkedudukan di unit kerja pada sekretariat daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang ekonomi.

Kepala perangkat daerah membentuk tim pelaksana program WUB yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah yang bersangkutan. Tim pelaksana program WUB mempunyai tugas sebagai berikut:

- 1) menyosialisasikan program WUB;
- 2) mengusulkan besaran kuota kepesertaan program WUB pada perangkat daerah;
- 3) menyelenggarakan proses seleksi calon peserta program WUB;
- 4) mengusulkan penetapan peserta Program WUB;
- 5) memfasilitasi pendampingan pada setiap tahapan kegiatan program WUB; dan
- 6) melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada kepala perangkat daerah.

Keanggotaan tim pelaksana program WUB terdiri dari unsur perangkat daerah yang bersangkutan. Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas tim pelaksana program WUB, dibentuk sekretariat tim pelaksana program WUB.

Untuk menyelenggarakan proses seleksi calon peserta program WUB, dapat dibentuk tim seleksi atau sebutan lainnya yang keanggotaannya berasal dari unsur tim pelaksana.

Tim seleksi mempunyai tugas antara lain melaksanakan pengu-
muman pendaftaran calon peserta program WUB, melaksanakan pro-
ses seleksi calon peserta program WUB, dan mengusulkan penetapan
calon peserta program WUB kepada kepala perangkat daerah. Su-
sunan keanggotaan tim seleksi paling sedikit terdiri dari ketua me-
rangkap anggota, sekretaris merangkap anggota, dan anggota. Keang-
gotaan tim seleksi berjumlah gasal dan disesuaikan dengan kebutuhan.

Dalam melaksanakan program WUB, kepala perangkat daerah
dibantu oleh fasilitator. Fasilitator mempunyai tugas pokok menggali
potensi dan kompetensi kewirausahaan yang meliputi proses peme-
taan minat, pemetaan bakat, pemetaan kelompok pelatihan dan peme-
taan kelompok pemagangan. Fasilitator berasal dari tenaga yang ber-
kompeten. Fasilitator program WUB ditetapkan dengan Keputusan
Kepala Perangkat Daerah.

Dalam melaksanakan kegiatan pelatihan, pemagangan dan pe-
mantauan aksesibilitas modal usaha dan pemanfaatan subsidi peserta
program WUB, kepala perangkat daerah dibantu oleh tenaga pen-
damping.

Tenaga pendamping mempunyai tugas memfasilitasi keberlang-
sungan bimbingan dan pelatihan kewirausahaan, memberikan arahan
praktik kerja dan praktik usaha, mengkomunikasikan perkembangan
kemajuan pelaksanaan program WUB kepada kepala perangkat
daerah, dan menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan pendam-
pingan kepada kepala perangkat daerah. Tenaga pendamping terdiri
dari sarjana pendamping, tenaga berpengalaman dan/atau praktisi
usaha yang ditetapkan dengan keputusan kepala perangkat daerah.

Penyelenggaraan program WUB dilaksanakan dengan mengem-
bangkan kerja sama, yang meliputi bidang pembentukan dan pengem-
bangan wirausaha dan pola pembiayaan wirausaha. Kerja sama di bi-
dang pembentukan dan pengembangan wirausaha dilaksanakan antara

perangkat daerah dengan pelaku usaha, perhimpunan pelaku usaha atau lembaga lain sesuai kebutuhan.

Kerja sama dilaksanakan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang dengan mempertimbangkan hasil evaluasi kinerja pelaksanaan program untuk setiap tahun anggaran. Kerja sama di bidang pola pembiayaan wirausaha dilaksanakan antara perangkat daerah dengan lembaga keuangan perbankan atau lembaga keuangan non perbankan. Pembiayaan atas pelaksanaan program WUB bersumber dari APBD.

Pemerintah daerah melaksanakan pembinaan untuk mendorong kemajuan praktik usaha para peserta program WUB. Pembinaan dilaksanakan oleh perangkat daerah dibantu tenaga pendamping. Dalam upaya mengembangkan program WUB, pemerintah daerah dapat membentuk klinik dan inkubasi bisnis.

Klinik dan inkubasi bisnis dibentuk setelah dilaksanakan evaluasi perkembangan kemajuan program WUB. Klinik dan inkubasi bisnis dibentuk dengan peraturan wali kota tersendiri.

Klinik dan inkubasi bisnis melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

- 1) advokasi;
- 2) informasi;
- 3) promosi;
- 4) konsultasi kewirausahaan;
- 5) pengembangan kewirausahaan (*coaching*).

Pemerintah daerah dapat memfasilitasi pembentukan pasar bersama dalam upaya mempromosikan komoditas, produksi dan jasa usaha dari pelaku usaha yang telah mengikuti pelatihan kewirausahaan program WUB pada kegiatan promosi di tingkat regional, nasional dan atau internasional.

Pemerintah daerah melaksanakan pengawasan program WUB. Pengawasan dilaksanakan oleh perangkat daerah dan inspektorat. Selanjutnya pemerintah daerah melaksanakan pengendalian program

WUB. Pengendalian dilaksanakan oleh perangkat daerah dan tim koordinasi program WUB. Dilaksanakan dalam setiap tahapan kegiatan program WUB melalui prosedur sebagai berikut:

- 1) *monitoring*;
- 2) pelaporan;
- 3) evaluasi tindak lanjut.

Monitoring, pelaporan dan evaluasi tindak lanjut dilaksanakan secara periodik atau sewaktu-waktu. Pelaporan yang dibuat secara periodik disampaikan secara tertulis dalam bentuk laporan triwulan, laporan semester, dan laporan akhir tahun. Pengendalian yang dilaksanakan oleh perangkat daerah berkenaan dengan teknis pelaksanaan kegiatan pada tahapan persiapan, pelaksanaan dan evaluasi program WUB yang meliputi kemajuan pelatihan, pemagangan dan pendampingan usaha.

Untuk mendukung pencapaian tujuan program WUB, diselenggarakan sistem informasi program WUB. Sistem informasi digunakan pada tahapan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian program WUB.

the 1990s, the number of people in the world who are illiterate has increased from 1.2 billion to 1.5 billion. The number of illiterate people in the world is expected to reach 1.8 billion by the year 2015 (UNESCO, 2003).

There are many reasons for the increase in illiteracy. One of the main reasons is the lack of access to education. In many developing countries, there are no schools or the schools are of very poor quality. This means that many children do not go to school and therefore do not learn to read and write.

Another reason for the increase in illiteracy is the high cost of education. In many developing countries, the cost of education is very high. This means that many families cannot afford to send their children to school. This is especially true for girls, who are often kept at home to help with household chores or to care for younger siblings.

There are also many social and cultural factors that contribute to illiteracy. In many developing countries, there is a strong emphasis on traditional values and customs. This means that education is often seen as a waste of time and money. In addition, many people in these countries are illiterate themselves, so they do not value education for their children.

There are many ways to reduce illiteracy. One of the most important ways is to improve access to education. This can be done by building more schools and providing more teachers. It can also be done by providing more financial support for education, especially for girls.

Another way to reduce illiteracy is to improve the quality of education. This can be done by providing more training for teachers and by using more modern teaching methods. It can also be done by providing more resources for schools, such as books and computers.

There are also many social and cultural ways to reduce illiteracy. One way is to change the attitudes of people towards education. This can be done by providing more information about the benefits of education. It can also be done by providing more role models who are literate and who value education.

There are many other ways to reduce illiteracy. The most important thing is to work together to find solutions that work for the people in these countries. Only then can we hope to reduce the number of illiterate people in the world and to create a more educated and prosperous future.



BAGIAN TIGA: BENCHMARK PROGRAM WIRAUSAHA BARU

Dr. Aneu Yulianeu, S.T., S.E., M.M.
Dr. Muhamad Nurdin Yusuf, S.E., M.P.

the 1990s, the number of people in the UK who are employed in the public sector has increased from 10.5 million to 12.5 million, and the number of people in the public sector who are employed in health care has increased from 2.5 million to 3.5 million (Department of Health 2000).

There are a number of reasons for this increase in the number of people employed in the public sector. One reason is that the public sector has become a more important part of the economy. Another reason is that the public sector has become a more attractive place to work. A third reason is that the public sector has become a more important part of society.

The public sector has become a more important part of the economy because it provides a number of essential services. These services include health care, education, and social care. The public sector has become a more attractive place to work because it offers a number of benefits, including job security and a good work-life balance. The public sector has become a more important part of society because it provides a number of essential services that are needed for a good quality of life.

The public sector has become a more important part of the economy because it provides a number of essential services. These services include health care, education, and social care. The public sector has become a more attractive place to work because it offers a number of benefits, including job security and a good work-life balance. The public sector has become a more important part of society because it provides a number of essential services that are needed for a good quality of life.

The public sector has become a more important part of the economy because it provides a number of essential services. These services include health care, education, and social care. The public sector has become a more attractive place to work because it offers a number of benefits, including job security and a good work-life balance. The public sector has become a more important part of society because it provides a number of essential services that are needed for a good quality of life.

The public sector has become a more important part of the economy because it provides a number of essential services. These services include health care, education, and social care. The public sector has become a more attractive place to work because it offers a number of benefits, including job security and a good work-life balance. The public sector has become a more important part of society because it provides a number of essential services that are needed for a good quality of life.

The public sector has become a more important part of the economy because it provides a number of essential services. These services include health care, education, and social care. The public sector has become a more attractive place to work because it offers a number of benefits, including job security and a good work-life balance. The public sector has become a more important part of society because it provides a number of essential services that are needed for a good quality of life.

The public sector has become a more important part of the economy because it provides a number of essential services. These services include health care, education, and social care. The public sector has become a more attractive place to work because it offers a number of benefits, including job security and a good work-life balance. The public sector has become a more important part of society because it provides a number of essential services that are needed for a good quality of life.

The public sector has become a more important part of the economy because it provides a number of essential services. These services include health care, education, and social care. The public sector has become a more attractive place to work because it offers a number of benefits, including job security and a good work-life balance. The public sector has become a more important part of society because it provides a number of essential services that are needed for a good quality of life.

Bagian Tiga

Benchmark Program Wirausaha Baru

Melihat praktik baik atau dikenal pula dengan istilah *benchmark* terhadap program yang dianggap serupa dengan program Wirausaha Baru (WUB) dipandang perlu dalam rangka membuka cakrawala terhadap substansi pengembangan wirausaha serta memahami konsep dan pendekatan yang dilakukan oleh institusi lain terhadap program dimaksud.

Adalah pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tepatnya Dinas Pariwisata, dan Budaya serta program OK OCE nasional yang dipilih untuk dijadikan sebagai *benchmark* dari program kewirausahaan yang dianggap berhasil.

Program pengembangan kewirausahaan di Provinsi DKI Jakarta awalnya diusung dengan nama OK OCE (*One Kecamatan One Centre of Entrepreneurship*) sejak masa kampanye pasangan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno hingga kemudian beliau berdua resmi menjabat sebagai gubernur dan wakil gubernur Provinsi DKI Jakarta.

Seiring berjalannya waktu, bahwasanya Bapak Sandiaga Uno kemudian mengundurkan diri dari jabatan sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta untuk mencalonkan diri menjadi wakil presiden pada Pilpres 2019. Program OK OCE kemudian diangkat menjadi program kewirausahaan nasional oleh Bapak Sandiaga Uno yang merupakan *founder* dari OK OCE menjadi salah satu program unggulan yang beliau tawarkan pada konstelasi Pilpres 2019 lalu.

Program pengembangan wirausaha di Provinsi DKI kemudian berganti nama menjadi program kewirausahaan terpadu atau lebih fa-

miliar dengan sebutan PKT. Program ini disahkan oleh Peraturan Gubernur (Pergub).

Program kewirausahaan terdapat dalam RPJMD Gubernur Provinsi DKI Jakarta dengan menyebutkan akan menciptakan 200.000 wirausaha sebagai upaya dalam pengentasan kemiskinan dan penyerapan tenaga kerja. Dalam pelaksanaannya, program kewirausahaan terpadu (PKT) “mesinnya” tetap mengadopsi konsep dan model OK OCE dalam gabungan kurikulum besar.

Konsep tersebut dikenal dengan 7 langkah PAS atau 7 langkah pasti sukses, adalah sbb:

- 1) pendaftaran;
- 2) pelatihan;
- 3) pendampingan;
- 4) perijinan;
- 5) pemasaran;
- 6) pembukuan;
- 7) permodalan.

Dinas Pariwisata dan Budaya Provinsi DKI Jakarta adalah sebagai institusi contoh yang diambil dalam rangka mempelajari dan memahami kaidah atau *best practice* apa saja yang telah dilaksanakan dalam program pengembangan wirausaha di Pemprop DKI Jakarta. Program Kewirausahaan Terpadu (PKT) merupakan program terintegrasi lintas dinas yang dilaksanakan di Provinsi DKI Jakarta. Integrasi yang dimaksud adalah dalam hal pelaksanaan program maupun anggaran kegiatan.

Antara dinas dapat terjadi kolaborasi pelaksanaan kegiatan ataupun *share* kepesertaan mengikuti kebutuhan substansi materi pelatihan yang dibutuhkan oleh peserta program. Kategori wirausaha yang dapat mengikuti PKT ada 2 (dua) yaitu:

- 1) wirausaha yang betul-betul masih baru atau berangkat dari awal;
- 2) wirausaha yang sudah berjalan dengan diarahkan untuk menjadi wirausaha naik kelas.

Di dinas pariwisata dan budaya pemberdayaan unsur PKT dikaitkan pula dalam program pengembangan wisata di DKI Jakarta dengan melibatkan 11.900 entitas bisnis di sektor pariwisata untuk mendukung PKT.

Tujuan utama PKT tidak diukur dengan berapa banyak wirausaha yang mengajukan permodalan kepada pihak bank, namun berapa banyak wirausaha baru yang berhasil diciptakan dan berapa banyak wirausaha yang naik kelas.

Pelaksanaan PKT dengan metode 7 langkah PAS di dinas pariwisata dan budaya secara rinci adalah sbb:

1. Pendaftaran

Sistem pendaftaran dilaksanakan di 7 SKPD dengan metode rekrutmen yang dilaksanakan secara manual maupun elektronik. Kegiatan rekrutmen berbasis di kecamatan. Seluruh kegiatan terpusat di kecamatan dengan metode wawancara langsung kepada calon peserta yang akan mengikuti program.

2. Pelatihan

Pelatihan merupakan kegiatan memberikan materi di kelas dengan materi umum misalnya mengenai kewirausahaan, bagaimana memulai sebuah usaha, dan pemahaman ketika memiliki usaha.

Setelah pelatihan materi umum, maka dilanjutkan dengan masuk ke materi spesifik atau materi vokasi yang dilaksanakan bekerja sama dengan pihak perguruan tinggi atau sekolah vokasi.

3. Pendampingan

Pendampingan merupakan tahapan yang paling diutamakan pada PKT ini, karena pada proses inilah diyakini akan menjadi parameter terhadap hasil apa yang akan dicapai di akhir program.

Jika proses pendampingan ini baik maka program diprediksi akan berhasil namun jika proses pendampingan tidak baik maka hasil akhirnya pun akan demikian.

Pendamping yang mendampingi para peserta di PKT bukan berasal dari ASN namun direkrut khusus dari profesional dengan berbagai disiplin ilmu serta harus memahami ilmu tentang kewirausahaan.

Pendamping yang direkrut kemudian akan dilatih dengan modul khusus di ESA unggul dengan perkuatan materi tentang kewirausahaan dan pengembangan usaha. Para pendamping akan mendampingi wirausaha sesuai bidang atau disiplin ilmu yang dimiliki.

Metode pendampingan dilakukan dengan 2 (dua) pendekatan yaitu; (1) pendampingan secara masal, dimana pendamping akan mengumpulkan para peserta di suatu lokasi atau tempat, dan biasanya di kecamatan kemudian akan berdiskusi dengan peserta seputar bagaimana pengembangan usaha para peserta; (2) pendampingan secara perseorangan, dimana seorang pendamping akan mendatangi peserta PKT secara pribadi ke lokasi usaha mereka dan melakukan konsultasi dengan peserta tersebut.

Untuk metode pendampingan yang kedua ini biasanya diperlukan pengajuan atau permintaan dari pihak peserta PKT kepada dinas terkait.

Hasil pendampingan model kedua ini bisa memberikan rekomendasi kepada dinas terkait terhadap kebutuhan apa yang diperlukan dalam pengembangan usaha peserta PKT, misalnya peserta PKT adalah wirausaha bidang makanan yang ingin naik kelas dan untuk menuju “naik kelas” tersebut membutuhkan sertifikat halal.

Maka pihak pendamping dapat merekomendasikan ke pihak dinas terkait untuk kemudian akan difasilitasi oleh dinas tersebut. Dalam situasi dimana Dinas Pariwisata dan Budaya tidak memiliki otoritas mengeluarkan sertifikat halal, maka Disparbud akan memberikan laporan kepada instansi terkait dan untuk kemudian akan dibantu dalam memfasilitasinya.

4. Perizinan

Dalam konteks fasilitasi perizinan Dinas Pariwisata dan Budaya melaksanakan fungsi koordinasi dengan PTSP dengan memberikan rekomendasi terhadap peserta PKT yang perlu difasilitasi perizinan usahanya.

Untuk program PKT telah dikeluarkan prosedur perizinan yang sederhana berbasis teknologi dengan konsep *Do It Yourself* dan hal ini diatur dalam regulasi resmi melalui Peraturan Gubernur (Pergub) khusus.

5. Pemasaran

Setelah aspek pendampingan bagi wirausaha yang diberikan penekanan lebih kuat dalam Program Kewirausahaan Terpadu, adalah aspek kedua yang diberikan penekanan lebih dalam perkuatan program ini adalah dalam hal fasilitasi pemasaran bagi wirausaha yang menjadi peserta PKT.

Dalam PKT dialokasikan anggaran untuk *event-event* pemasaran seperti bazar, pameran nasional dan internasional serta forum-forum bisnis.

Di samping itu, pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga memiliki *online marketing* dengan *platform* khusus dan peserta PKT menjadi prioritas untuk difasilitasi masuk dalam *online platform marketing* tersebut.

Sektor yang dikembangkan di Disparbud adalah kuliner, seni budaya (sanggar seni), dan agro wisata. Program pemasaran juga dilakukan melalui saluran komitmen pemerintah dimana setiap Dinas di Provinsi DKI Jakarta harus “menyerap” hasil produk para peserta PKT.

6. Pembukuan

Tahapan ini merupakan pemberian wawasan tentang tata kelola manajemen keuangan bagi para wirausaha. Pengetahuan ini dianggap penting untuk sebagai upaya agar entitas usaha dapat berjalan dengan

baik. Materi ini dibahas secara spesifik dengan konsep kelas dan juga pada tahapan pendampingan oleh pendamping.

Pelaksanaan tahapan ini dilakukan dengan membuat aplikasi dengan nama “Si Apik” dan bekerja sama dengan Bank Indonesia.

7. Permodalan

Pada tahapan permodalan bagi peserta PKT. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bekerja sama dengan beberapa bank dengan melakukan komitmen pemberian suku bunga terendah.

Peran program PKT adalah memberikan rekomendasi terhadap peserta PKT untuk dapat diberikan akses terhadap permodalan usaha.

Para peserta di PKT tidak mendapatkan fasilitasi uang saku maupun pengganti transportasi. Namun demikian, para peserta PKT mendapatkan layanan pendampingan dari program secara intensif dan tidak terbatas selama program berjalan.

Benchmark kedua dilakukan kepada lembaga OK OCE Indonesia yang saat ini telah berdiri sebagai institusi formal dengan nama Perkumpulan Gerakan OK OCE. Institusi ini bertujuan menjadi gerakan sosial penciptaan lapangan kerja.

Co-founder OK OCE, Indra Cahya Uno menyampaikan bahwa OK OCE dapat menjadi mesin bagi seluruh program pengembangan kewirausahaan di Indonesia yang pada implementasinya dapat dilakukan gabungan kurikulum sesuai dengan situasi, kondisi, dan kebutuhan di daerah.

Hal tersebut telah dilaksanakan di Provinsi DKI Jakarta dalam Program Kewirausahaan terpadu (PKT) yang disahkan oleh Peraturan Gubernur (Pergub).

OK OCE Indonesia saat ini melakukan program pelatihan bagi fasilitator dengan menitikberatkan pelatihan kepada pembentukan *mindset*. Ruh program OK OCE adalah pendampingan, sehingga kompetensi dan posisi para fasilitator ini harus kuat agar mampu “mengayomi” para wirausaha yang akan berkembang atau sedang akan dikembangkan.

OK OCE Indonesia saling mendukung dengan program PKT dengan melakukan training kepada para pendamping. Saat ini sudah mencapai 619 pendamping yang dilatih oleh OK OCE Indonesia dan target yang ingin dicapai adalah 50 pendamping per kecamatan di seluruh Provinsi DKI Jakarta. Tugas dari para pendamping ini adalah menjalankan kurikulum yang disusun oleh OK OCE Indonesia.

Desain inti OKE OCE adalah 7 langkah PAS dan salah satunya adalah tahapan perijinan. Tahapan perijinan ini merupakan step yang krusial dalam mendorong para wirausaha untuk naik kelas. Wirausaha yang difasilitasi perijinan dipandang memiliki kemampuan dalam menjalankan atau mengelola usahanya.

Dalam tahapan pemasaran juga pendekatan yang diberikan adalah memberikan akses terhadap sumber-sumber pemasaran, misalnya melalui *event* promosi.

Kemudian dalam tahapan pembukuan atau lebih penekanannya kepada laporan keuangan, para wirausaha dibimbing untuk bisa mengakses ilmu pengetahuan atau wawasan terhadap tata cara atau tata kelola laporan keuangan yang baik.

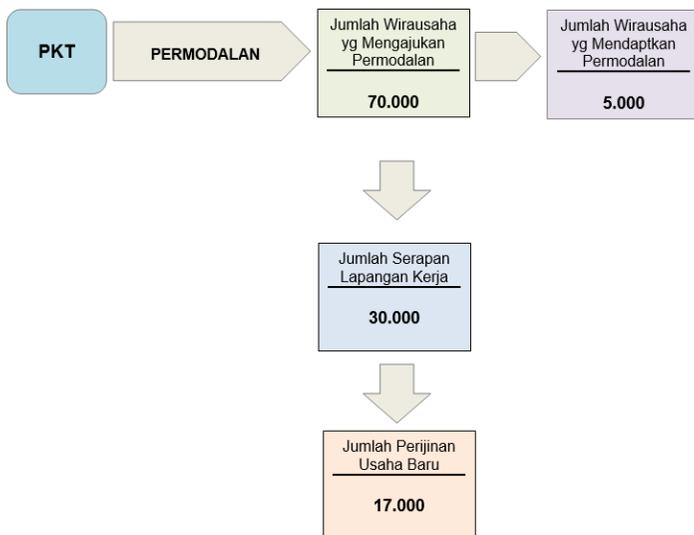
Tahapan terakhir dalam desain inti OK OCE adalah permodalan dimana bukan diberikan bantuan permodalan serta tidak diberikan di awal ketika wirausaha memulai usahanya.

Namun pendekatan permodalan yang dibelikan adalah untuk menguji “mentalitas” seorang pengusaha supaya yang bersangkutan dapat “naik kelas”. Skema permodalan yang diberikan adalah berupa pemberian akses kepada sumber-sumber permodalan.

Untuk aspek modal ini pihak OK OCE Indonesia menerapkan analogi bahwa dalam membangun sebuah rumah “atap” selalu dibangun di akhir namun fondasi yang dibangun di awal dan harus kuat. Artinya mentalitas dan *mindset* seorang wirausaha yang harus dibangun dan ditempa terlebih dahulu maka jika sudah kuat “atap=modal” diberikan di akhir untuk “naik kelas”.

Realisasi tahapan permodalan bukan menjadi tolok ukuran program OK OCE maupun PKT, namun penekanan lebih kepada berapa

jumlah entitas bisnis yang bisa diciptakan dan berapa lapangan kerja yang bisa diserap. Berikut gambaran rasio realisasi permodalan pada program PKT:



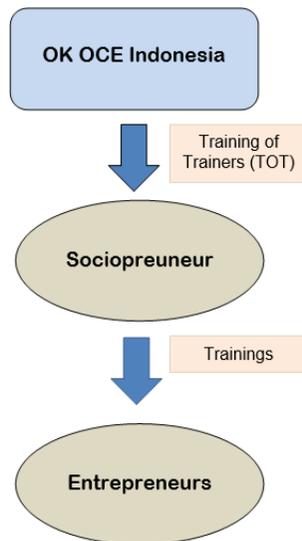
Gambar 3.1
Rasio realisasi permodalan pada program PKT.

Saat ini OK OCE didorong untuk menjadi gerakan sosial masyarakat agar pendekatannya lebih *sustainable*. Dalam mencapai target dan hasil yang diharapkan, desain pengembangan OK OCE Indonesia memberikan penekanan kepada tahapan pendampingan dengan melibatkan “penggerak komunitas”.

Pemberian kurikulum OK OCE tidak diberikan langsung kepada masyarakat atau wirausaha namun diberikan kepada “penggerak komunitas”. OK OCE Indonesia akan memberikan kurikulum dengan metode *Training of Trainers* (TOT) kepada penggerak komunitas disesuaikan dengan kondisi, situasi, dan kebutuhan daerah di mana penggerak komunitas tersebut berada.

OK CE Indonesia bukan merupakan lembaga bisnis namun bagi penggerak komunitas yang telah mengikuti TOT diperbolehkan membentuk badan usaha dan melakukan kegiatan yang bertujuan komersial.

Namun demikian OK OCE Indonesia memiliki lisensi atas *brand* dan berhak mencabut kembali jika implementasi di lapangan tidak sesuai dengan tujuan, konsep dan ruh OK OCE Indonesia. Ruh OK OCE sejatinya telah dikembangkan sejak tahun 2000 melalui yayasan Mien R. Uno. Flow distribusi peran pada gerakan OK OCE Indonesia adalah sbb:



Gambar 3.2

Flow distribusi peran pada gerakan OK OCE Indonesia.

Jenis pelatihan atau training yang dilaksanakan oleh OK OCE Indonesia dapat dilakukan secara *“situational”* dan *on demand* dengan menganut kaidah AIDA.

A = *Attention*

I = *Interest*

D = *Desire*

A = *Action*

OK OCE memiliki platform 7 langkah PAS dengan tujuan atau target utama adalah:

- Mencari kerja
 - Mau usaha
 - Mau naik kelas
- } Menciptakan lapangan kerja



**BAGIAN EMPAT:
IMPLEMENTASI BENCHMARK
WIRAUSAHA BARU**
Case Study: Kota Tasikmalaya

Dr. Aneu Yulianeu, S.T., S.E., M.M.
Dr. Muhamad Nurdin Yusuf, S.E., M.P.

Bagian Empat

Implementasi Benchmark

Wirausaha Baru

Case Study: Kota Tasikmalaya

Implementasi tata kelola program WUB sesuai arahan Peraturan Walikota nomor 21 tahun 2017 tidak dapat sepenuhnya dilaksanakan sesuai kaidah dan acuan yang tertuang dalam peraturan dimaksud. Dikarenakan situasi dan kondisi di lapangan serta keterbatasan sumber daya manusia yang terlibat sebagai pelaksana teknis, maka pada pelaksanaannya tahapan-tahapan kegiatan di setiap perangkat daerah atau dinas terkait tidak dapat dilaksanakan secara runut dan bersamaan sesuai amanat Perwalkot 21 tahun 2017.

Beberapa hal yang menjadi kendala pada kurang optimalnya pelaksanaan kegiatan WUB tahun 2018 adalah sebagai berikut.

- 1) Pada tahapan pemetaan minat dan bakat peserta, beberapa OPD karena kondisi tertentu, melaksanakannya pasca kegiatan pelatihan kompetensi umum (pelatihan kewirausahaan) dan atau pelatihan teknis. Hal ini dikarenakan terjadi "*waiting list*" peserta yang akan mengikuti proses/tahapan pemetaan minat dan bakat.
- 2) Kondisi di atas berakibat pada kurang optimalnya hasil yang ingin dicapai. Karena seyogyanya akurasi dokumen awal yaitu hasil pemetaan minat dan bakat yang akan menjadi "acuan dasar" untuk menentukan intervensi yang tepat untuk diberikan kepada peserta WUB tersebut.

- 3) Kendala waktu yang dianggap “kurang efisien” dalam model dan konsep pada tahapan pemetaan minat dan bakat yang telah dilaksanakan menjadi faktor hambatan dalam optimalisasi kegiatan.
- 4) Tingkat partisipasi peserta tidak optimal dikarenakan keterbatasan dari sisi finansial peserta yang harus melalui beberapa tahapan proses kegiatan dengan durasi yang cukup panjang, sehingga *spending cost* peserta cukup tinggi apalagi bagi wirausaha baru hal ini menjadi “beban” tersendiri.
- 5) Model dan aturan yang berlaku dalam hal pemberian akses pe-modalán dianggáp masih berat bagi para WUB.

Jika kita bersama-sama menganalisis titik kekuatan dan kelemahan dari pelaksanaan kegiatan WUB 2018 dapat digambarkan dalam tabel sebagai berikut.

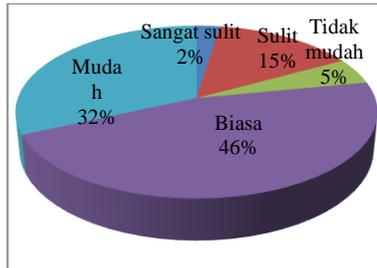
Tabel 3.1
Pelaksanaan Kegiatan WUB

Kekuatan	Kelemahan
<ul style="list-style-type: none"> - Program dirasakan bermanfaat bagi OPD karena dapat menemukenali potensi calon wirausaha di Kota Tasikmalaya. - Materi Kompetensi Umum (MKU) dianggap bermanfaat karena memberikan wawasan tentang kewirausahaan serta motivasi menjadi seorang wirausaha; 4 OPD (+) dan 1 OPD (-). - Pelatihan teknis/magang cukup baik atau bermanfaat bagi peserta. 	<ul style="list-style-type: none"> - Pemetaan minat dan bakat dengan metode yang dilaksanakan saat ini dipandang belum kompatibel dengan alokasi waktu dan anggaran yang dialokasikan oleh OPD. - Durasi waktu tahapan <i>talent mapping</i> dirasa membebani peserta dari aspek biaya mobilisasi. - Karena keterbatasan anggaran dan SDM menghasilkan “daftar antrean” yang panjang dalam berjalannya program.

	<ul style="list-style-type: none"> - Durasi pelatihan teknis/magang dirasa masih belum memadai perlu ada penambahan durasi. - Skema pemberian modal yang berlaku memberatkan peserta WUB dengan skema Jaminan tertentu terhadap pinjaman. - Pendampingan kepada alumni WUB paska kegiatan dirasa belum optimal karena keterbatasan SDM tenaga pendamping serta anggaran operasional untuk kegiatan dimaksud.
--	---

Di samping menyoroti tata kelola dan tata laksana kegiatan WUB 2018, penyusun mencoba menggali pendapat dari para peserta program Wirausaha Baru 2018 atau dapat kita sebut sebagai “alumni WUB angkatan 2018”. Proses penggalan pendapat ini dilakukan dengan menyebarkan *questionnaire* digital yang dapat mereka isi langsung di *smart phone* atau ponsel pintar mereka dan hasilnya langsung terhubung ke sistem pengolahan data penyusun. Hasil dari *questionnaire* dari peserta WUB 2018 ini kemudian dianalisis dan dapat diketahui lebih lanjut dalam paparan berikut sebagai berikut.

1. Apakah program WUB sudah dipahami sebagai program yang baik untuk diikuti?

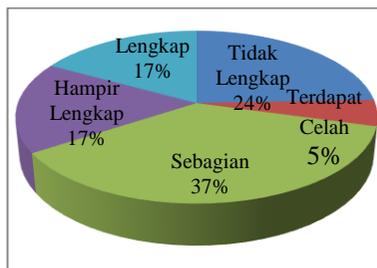


Gambar 4.1

Persentase program WUB dipahami sebagai program yang baik untuk diikuti.

Sebagian besar responden menjawab biasa saja terkait dengan program WUB. Dominannya jawaban responden tersebut terkait dengan banyaknya program yang telah digulirkan oleh pemerintah untuk mendorong jiwa wirausaha. Responden beranggapan bahwa jiwa wirausaha itu sendiri dapat tumbuh dari dalam diri sendiri dan berkaitan dengan motivasi seseorang.

2. Apakah topik dalam pelatihan WUB menurut anda tercakup dengan lengkap?

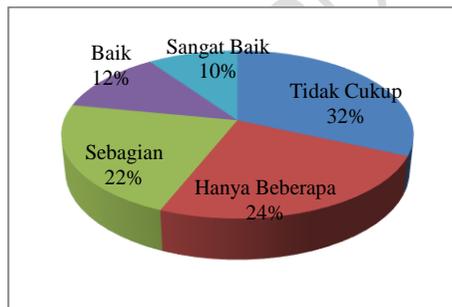


Gambar 4.2

Persentase topik dalam pelatihan WUB tercakup dengan lengkap.

Hasil analisis menunjukkan bahwa mayoritas responden menjawab bahwa topik dalam pelatihan WUB sudah cukup lengkap. Hal ini mengandung arti bahwa topik yang diberikan oleh instruktur pada saat pelatihan cukup sesuai dengan harapan peserta pelatihan. Namun demikian, masih ada peserta pelatihan (24 persen) yang menganggap bahwa topik yang diberikan pada saat pelatihan tidak lengkap. Beberapa topik yang diberikan pada saat pelatihan diantaranya masih dianggap kurang relevan.

3. Apakah mekanisme program WUB yang sudah dilaksanakan sesuai harapan: seleksi, *talent mapping*, pelatihan, pemagangan, dan lain-lain sudah sesuai harapan?

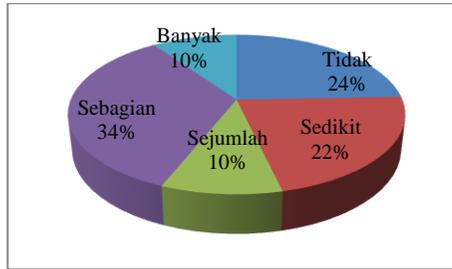


Gambar 4.3

Persentase mekanisme program WUB yang dilaksanakan sesuai harapan.

Mekanisme program yang sudah dilaksanakan meliputi seleksi, *talent mapping*, pelatihan, pemagangan, dan sebagainya dianggap oleh sebagian besar responden tidak sesuai dengan harapan. Hal ini mengandung arti bahwa program tersebut tidak dapat memenuhi harapan responden.

4. Apakah pelaksanaan WUB sudah sesuai *schedule* saat sosialisasi?

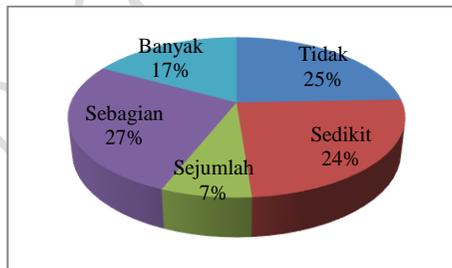


Gambar 4.4

Persentase pelaksanaan WUB sesuai *schedule* saat sosialisasi.

Terkait dengan kesesuaian antara pelaksanaan WUB dengan *schedule* pada saat sosialisasi, sebagian besar responden menjawab bahwa pelaksanaan WUB sebagian telah sesuai dengan *schedule*. Hal ini mengandung arti bahwa masih ada sebagian kegiatan yang tidak terdapat atau tidak sesuai dengan *schedule* yang telah disusun sebelumnya.

5. Apakah rekrutmen peserta pelatihan sesuai dengan kebutuhan?



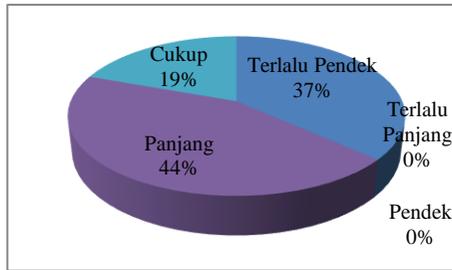
Gambar 4.5

Persentase rekrutmen peserta pelatihan.

Rekrutmen peserta merupakan salah satu faktor yang menentukan keberhasilan suatu program pelatihan. Sebagian besar respon-

den menyatakan bahwa rekrutmen peserta pelatihan yang telah dilakukan dirasa belum sesuai dengan kebutuhan peserta pelatihan.

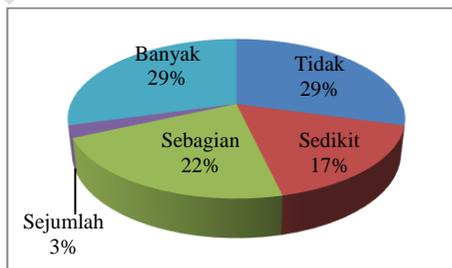
6. Apakah waktu pelaksanaan program cukup?



Gambar 4.6
Persentase waktu pelaksanaan program.

Terkait dengan tingkat kecukupan waktu pelaksanaan program, sebagian besar responden menjawab bahwa waktu pelaksanaan program adalah sangat leluasa. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa program WUB dilaksanakan selama 1 (satu) tahun merupakan waktu yang sangat panjang.

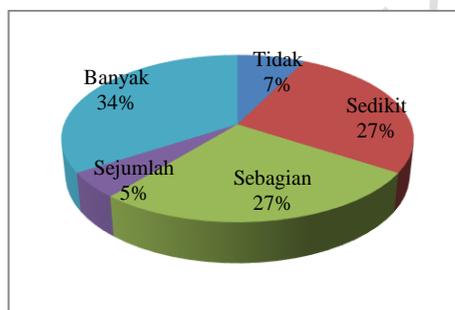
7. Apakah anda mendapat manfaat banyak dari pelaksanaan *talent mapping*, untuk perkembangan usaha anda?



Gambar 4.7
Persentase manfaat dari pelaksanaan *talent mapping*.

Jawaban responden sangat bervariasi terkait manfaat pelaksanaan *talent mapping* dikaitkan dengan perkembangan usaha. Variatifnya jawaban responden tersebut tentunya terkait dengan kebutuhan responden mengenai pelatihan yang dilaksanakan. Walaupun demikian apabila dilihat secara keseluruhan maka dapat dikatakan bahwa pelaksanaan *talent mapping* tidak begitu dirasakan manfaatnya untuk perkembangan usaha yang dijalankan oleh responden.

8. Apakah waktu pelaksanaan *talent mapping* sesuai dengan ketersediaan waktu anda?

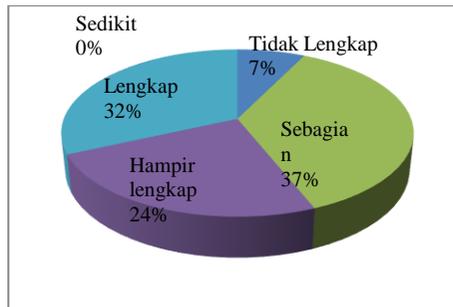


Gambar 4.8

Persentase waktu pelaksanaan *talent mapping*.

Jawaban responden mengenai kesesuaian pelaksanaan *talent mapping* dengan ketersediaan waktu ternyata lebih didominasi oleh responden yang menjawab memiliki ketersediaan waktu yang banyak. Hal ini tentunya terkait dengan waktu luang yang memang banyak dimiliki oleh responden.

9. Apakah konten dalam pelaksanaan *talent mapping* menurut anda sudah cukup baik?



Gambar 4.9

Persentase konten dalam pelaksanaan *talent mapping*.

Terkait konten dalam pelaksanaan *talent mapping*, sebagian besar responden menyatakan bahwa sebagian konten sudah lengkap, hal ini mengandung arti bahwa konten yang dimasukkan dalam pelaksanaan *talent mapping* sudah sesuai dengan kebutuhan responden.

10. Apakah anda mendapat informasi dan tindak lanjut dari hasil *talent mapping* dari panitia?

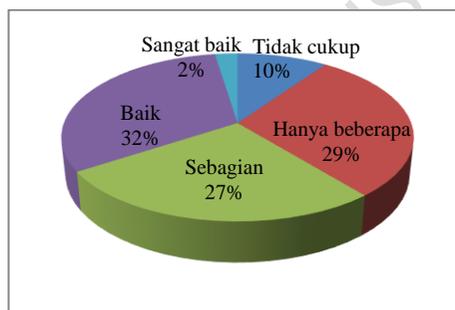


Gambar 4.10

Persentase informasi dan tindak lanjut dari hasil *talent mapping*.

Hasil yang telah dicapai dari suatu kegiatan sebaiknya ditindaklanjuti dengan kegiatan yang lain yang dapat menunjang keberhasilan suatu program. Sebagian besar responden menyatakan bahwa mereka tidak memperoleh informasi lebih lanjut dari panitia mengenai hasil *talent mapping*. Padahal secara teoritis hasil pelaksanaan *talent mapping* dapat dijadikan sebagai dasar yang dapat dijadikan sebagai landasan bahwa responden sebenarnya mempunyai bakat dan keahlian pada bidang tertentu yang selanjutnya dapat dikembangkan untuk merintis bidang usaha yang dapat dijalankannya ke depan.

11. Apakah narasumber dapat menjelaskan hubungan yang kompleks dengan cara yang dapat dimengerti?



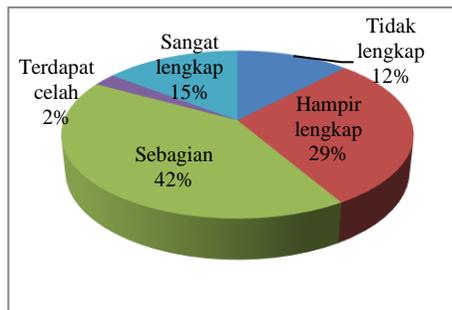
Gambar 4.11

Persentase kemampuan narasumber dalam menjelaskan hubungan yang kompleks dengan cara yang dapat dimengerti.

Dalam menyampaikan suatu materi, instruktur seharusnya dapat menjelaskan dengan cara yang dapat dimengerti oleh seluruh peserta pelatihan. Tanggapan responden mengenai penjelasan yang telah diberikan oleh instruktur adalah dominan baik. Hal ini mengandung arti bahwa instruktur telah menjelaskan materi pelatihan dengan baik sehingga dapat dimengerti oleh seluruh peserta pelatihan. Walaupun demikian, masih terdapat beberapa responden yang menganggap bahwa materi yang disampaikan oleh instruktur pada saat pelatihan tidak se-

penuhnya dipahami. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa peserta pelatihan ternyata lebih didominasi oleh mereka dengan pendidikan yang rendah. Rendahnya tingkat pendidikan berhubungan dengan tingkat pengetahuan, sehingga daya tangkap peserta terhadap materi yang disampaikan oleh instruktur juga berbeda.

12. Apakah narasumber menjelaskan berdasarkan permintaan dengan cukup jelas?

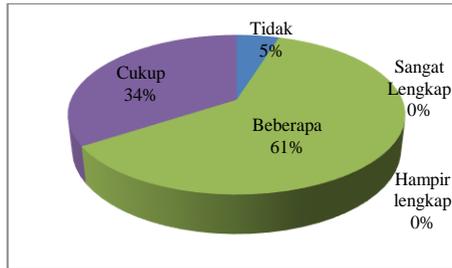


Gambar 4.12

Persentase kemampuan narasumber dalam menjelaskan berdasarkan permintaan.

Tanggapan responden bahwa narasumber telah menjelaskan sesuai dengan permintaan peserta sebagian sudah cukup jelas. Hal ini mengandung arti bahwa setiap permintaan yang disampaikan oleh peserta pelatihan dapat dijelaskan secara gamblang sehingga dapat dimengerti oleh peserta pelatihan.

13. Apakah narasumber menggunakan contoh-contoh untuk menggambarkan konten dengan lebih baik?

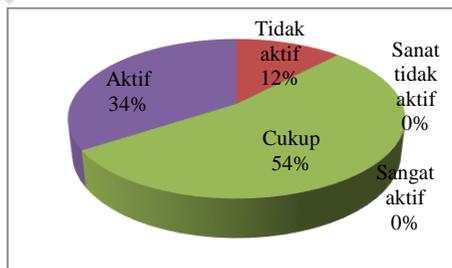


Gambar 4.13

Persentase kemampuan narasumber dalam menggunakan contoh-contoh untuk menggambarkan konten.

Terkait dengan penggunaan contoh dalam menggambarkan materi pelatihan, sebagian besar responden menjawab bahwa beberapa materi telah dijelaskan dengan menggunakan contoh-contoh yang relevan. Secara teoritis, penggunaan contoh dalam menggambarkan konten suatu materi dalam kegiatan pelatihan sangat membantu peserta pelatihan untuk dapat memahaminya.

14. Apakah narasumber berusaha secara aktif untuk melibatkan peserta?

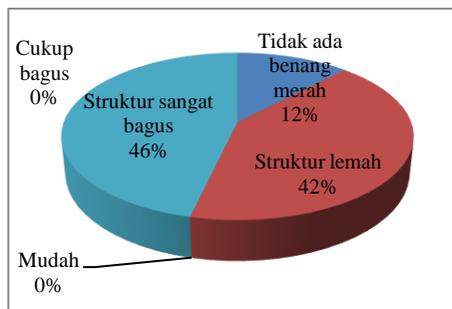


Gambar 4.14

Persentase keaktifan narasumber.

Sebagian besar responden menyatakan bahwa nara sumber cukup aktif melibatkan peserta pelatihan. Nara sumber pada saat pelatihan selalu memberikan kesempatan bertanya kepada peserta pelatihan terkait materi yang disampaikan dengan tujuan supaya peserta pelatihan dapat lebih memahami mengenai materi yang disampaikan.

15. Apakah struktur presentasi yang disampaikan kepada anda dapat dipahami dengan mudah?

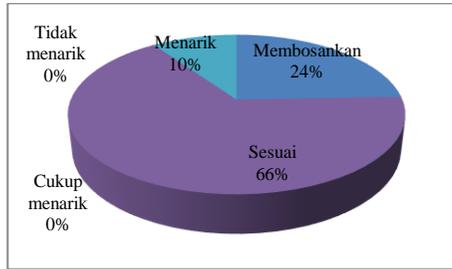


Gambar 4.15

Persentase struktur presentasi yang disampaikan.

Sebagian besar responden menyatakan bahwa struktur presentasi yang disampaikan oleh narasumber sangat bagus sehingga dapat mudah dipahami oleh peserta pelatihan. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa presentasi yang disampaikan oleh narasumber telah terstruktur dengan baik sesuai dengan konten yang diberikan. Narasumber menyusun *slide* presentasi secara bertahap sesuai dengan tingkat kerumitan dari materi yang diberikan mengingat peserta pelatihan berasal dari latar belakang yang sangat bervariasi.

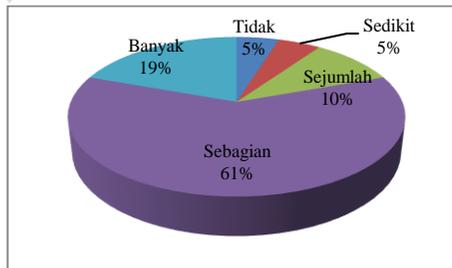
16. Apakah visual presentasi menurut anda, disusun secara menarik?



Gambar 4.16
Persentase visual presentasi.

Presentasi yang baik harus dibuat semenarik mungkin supaya *audiens* tidak merasa bosan dalam menyimak seluruh paparan yang diberikan oleh pembicara. Tanggapan responden terkait dengan visual presentasi menunjukkan bahwa presentasi yang disajikan telah disusun secara menarik sehingga tidak terkesan membosankan. Fakta di lapangan terungkap bahwa dalam penyajian presentasi yang disampaikan tidak hanya berupa kalimat, tetapi juga dilengkapi dengan contoh-contoh kongkret serta dilengkapi dengan gambar dan juga foto yang disajikan secara menarik.

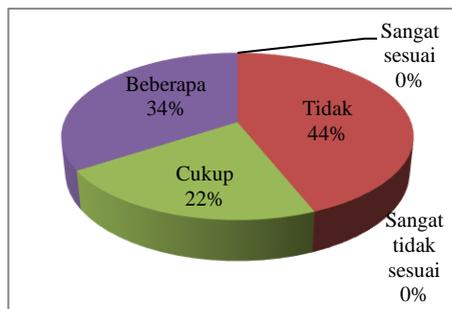
17. Apakah presentasi memberikan inspirasi, rangsangan atau ide-ide baru?



Gambar 4.17
Persentase memberikan inspirasi, rangsangan atau ide-ide baru.

Sebagian besar responden menjawab bahwa presentasi telah memberikan inspirasi atau ide-ide baru kepada peserta. Munculnya inspirasi dan ide-ide baru tersebut tentunya tidak terlepas dari penyajian presentasi tersebut. Seperti telah dijelaskan sebelumnya bahwa presentasi yang disampaikan juga dilengkapi dengan gambar dan foto sehingga dapat merangsang munculnya ide-ide baru.

18. Apakah menurut anda kegiatan pemagangan sudah sesuai dengan kebutuhan calon wirausaha baru?

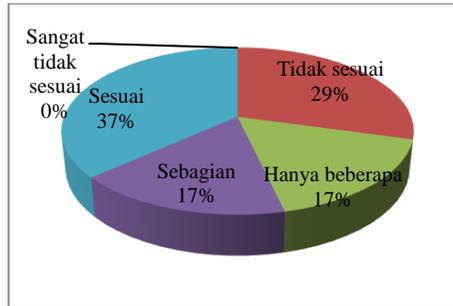


Gambar 4.18

Persentase kegiatan pemagangan sesuai dengan kebutuhan calon wirausaha baru.

Tanggapan responden mengenai kesesuaian kegiatan pemagangan dengan kebutuhan calon wirausaha baru sebagian besar menganggap bahwa kegiatan pemagangan yang dilakukan tidak sesuai dengan kebutuhan calon wirausaha. Hal ini mengandung arti bahwa terjadi kontradiktif antara kebutuhan calon wirausaha baru dengan kegiatan pemagangan yang dilakukan. Walaupun demikian, secara keseluruhan menganggap bahwa kegiatan pemagangan telah sesuai dengan kebutuhan calon wirausaha. Hanya saja perlu dilakukan upaya-upaya perbaikan mengenai pelaksanaan pemagangan tersebut supaya lebih mendekati kebutuhan calon wirausaha baru.

19. Apakah bidang pemagangan telah sesuai dengan bidang usaha yang anda pilih?

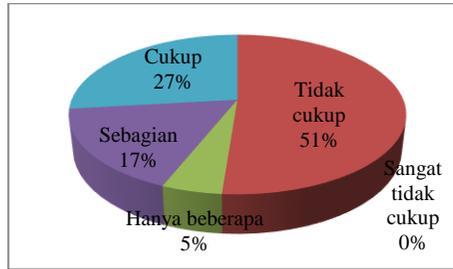


Gambar 4.19

Persentase bidang pemagangan sesuai dengan bidang usaha yang anda pilih.

Terkait dengan kesesuaian antara bidang pemagangan dengan bidang usaha yang dipilih oleh peserta pelatihan, dominasi responden menjawab sesuai. Dominannya jawaban responden tersebut mengandung arti bahwa peserta pelatihan melakukan magang di tempat yang sesuai dengan bidang usaha yang dipilih oleh responden. Adanya kesesuaian antara bidang pemagangan dengan bidang usaha yang dipilih oleh peserta pelatihan diharapkan dapat memberikan pengalaman yang cukup kepada peserta pelatihan sehingga pada saatnya mereka menjalankan usaha dapat dengan mudah menerapkannya.

20. Apakah waktu yang digunakan untuk pelaksanaan pemagangan sudah cukup?

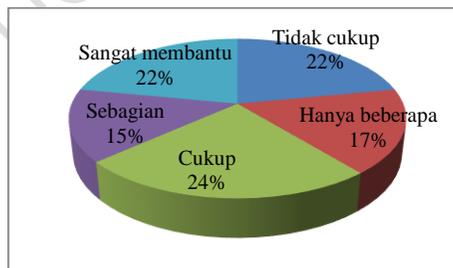


Gambar 4.20

Persentase waktu yang digunakan untuk pelaksanaan pemagangan.

Waktu yang digunakan untuk pelaksanaan pemagangan yang cukup singkat dirasakan tidak cukup oleh sebagian besar peserta pelatihan. Waktu yang dirasakan singkat tersebut menyebabkan peserta pelatihan tidak memperoleh pengalaman yang maksimal sehingga dikawatirkan mereka tidak dapat belajar bagaimana menjalankan usaha sementara persaingan di luar begitu ketat. Untuk itu perlu perencanaan yang lebih matang terkait dengan alokasi waktu yang dibutuhkan untuk melakukan pemagangan.

21. Apakah fungsi pendamping pada saat pemagangan, dapat membantu kebutuhan anda?

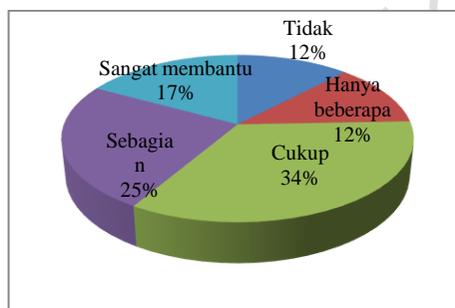


Gambar 4.21

Persentase fungsi pendamping pada saat pemagangan.

Adanya pendamping pada saat pemagangan dirasakan membantu oleh sebagian besar peserta pelatihan. Hal itu tergambar dari dominannya jawaban peserta pelatihan yang menyatakan bahwa fungsi pendamping pada saat pemagangan cukup membantu kebutuhan peserta pelatihan. Hasil pengamatan di lapangan menunjukkan bahwa pendamping sudah menjalankan fungsinya secara optimal dalam melayani kebutuhan peserta pelatihan.

22. Apakah selama pemagangan, anda mendapat arahan dan bantuan dari tempat magang?

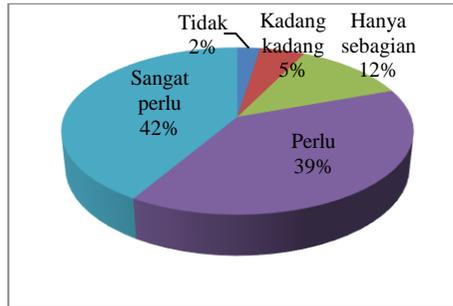


Gambar 4.22

Persentase arahan dan bantuan dari tempat magang.

Selama peserta pelatihan melakukan pemagangan, pengelola tempat magang cukup membantu dalam memberikan arahan kepada peserta pelatihan. Dominannya pernyataan peserta pelatihan tersebut didukung oleh fakta bahwa setiap ada pertanyaan dari peserta pelatihan terkait dengan kegiatan mereka di tempat magang selalu dijawab dengan baik.

23. Apakah menurut anda kegiatan WUB memerlukan tenaga pendamping?

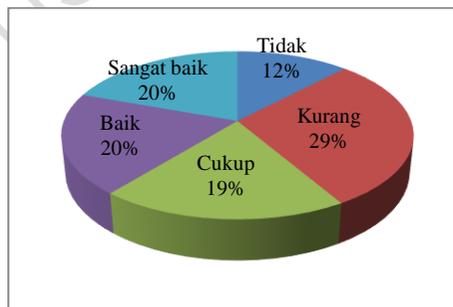


Gambar 4.23

Persentase tenaga pendamping pada kegiatan WUB.

Peserta pelatihan menganggap bahwa kegiatan wirausaha baru memerlukan tenaga pendamping yang akan mendampingi mereka selama melakukan pelatihan. Tenaga pendamping diperlukan terkait dengan pelaksanaan teknis operasional selama peserta mengikuti pelatihan.

24. Apakah tenaga pendamping memiliki kompetensi usaha untuk mendampingi calon WUB?

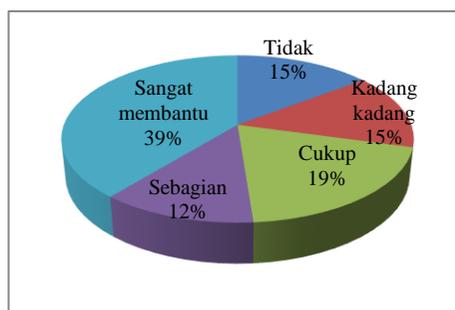


Gambar 4.24

Persentase kompetensi usaha pada tenaga pendamping.

Menurut peserta pelatihan, tenaga pendamping yang mendampingi mereka selama pelatihan telah memiliki standar kompetensi yang diperlukan. Hal itu dapat dilihat dari dominannya jawaban peserta pelatihan yang menyatakan sangat baik, baik, dan cukup.

25. Apakah tenaga pendamping membantu anda selama program WUB berjalan?

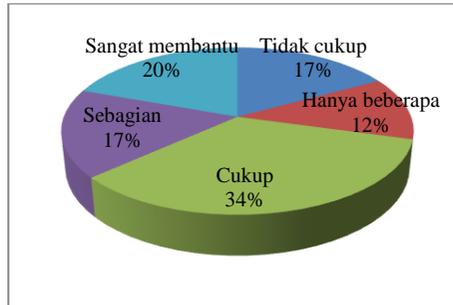


Gambar 4.25

Persentase bantuan tenaga pendamping selama program WUB berjalan.

Selama mengikuti program wirausaha baru, peserta pelatihan merasa dibantu oleh tenaga pendamping yang terlihat dari dominannya pernyataan responden yang menjawab “sangat membantu”. Hal ini menunjukkan bahwa peran tenaga pendamping sangat diperlukan untuk mendampingi peserta pelatihan selama program wirausaha baru tersebut. Bantuan yang diberikan oleh tenaga pendamping dapat berupa arahan-arahan serta masukan-masukan kepada peserta pelatihan program wirausaha baru.

26. Apakah fungsi pendamping pada saat pemagangan dapat membantu kebutuhan anda?

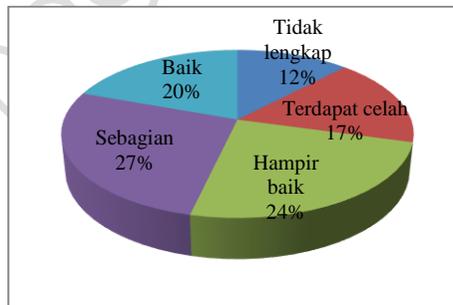


Gambar 4.26

Persentase fungsi pendamping pada saat pemagangan.

Fungsi pendamping pada saat kegiatan pemagangan cukup membantu kebutuhan peserta pelatihan yang direfleksikan oleh dominannya jawaban responden yang menyatakan cukup membantu.

27. Apakah menurut anda OPD yang memfasilitasi program WUB, sudah dapat menjalankan program dengan baik?

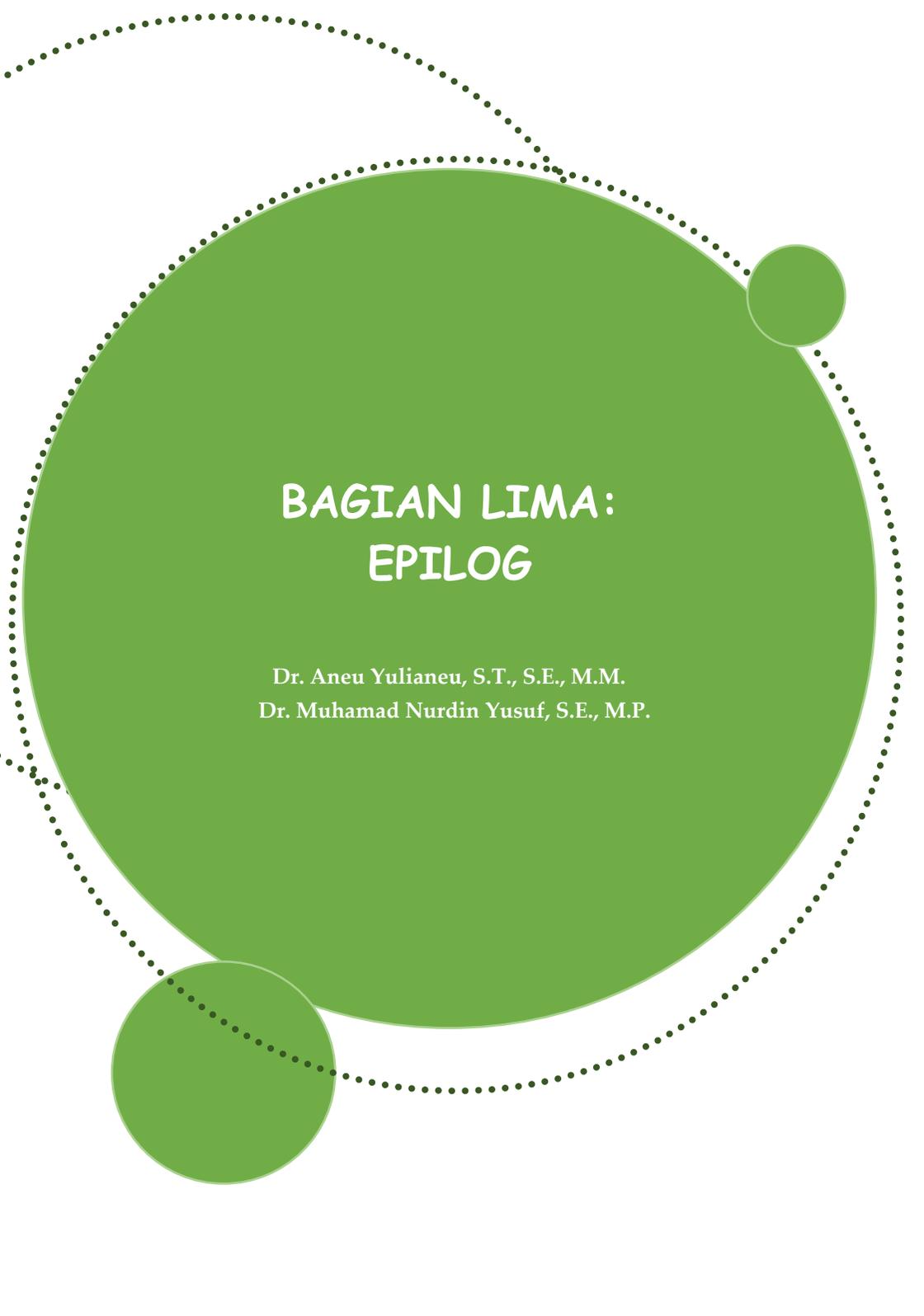


Gambar 4.27

Persentase OPD yang memfasilitasi program WUB.

Peran OPD sebagai fasilitator program pelatihan wirausaha baru sudah cukup baik dalam menjalankan programnya. Dominannya jawaban responden tersebut menunjukkan bahwa OPD sebagai fasilitator program telah menjalankan fungsinya dengan baik. Walaupun demikian, menurut beberapa peserta pelatihan, peran OPD dalam menjalankan program pelatihan wirausaha baru masih memiliki beberapa kelemahan.

Langgam Pustaka



BAGIAN LIMA: EPILOG

Dr. Aneu Yulianeu, S.T., S.E., M.M.
Dr. Muhamad Nurdin Yusuf, S.E., M.P.

Bagian Lima

Epilog

Berdasarkan pemaparan sebagaimana pada bab-bab sebelumnya penelitian ini dilakukan sebagai bahan pertimbangan dalam rangka merevitalisasi Program Pencetakan 5.000 Wirausaha Baru yang mendapatkan penilaian “Kategori Program belum Produktif” sebagaimana tercantum dalam Rekomendasi DPRD Terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Wali Kota Tasikmalaya Tahun 2018.

Penilaian “Kategori Program Belum Produktif” dari DPRD Kota Tasikmalaya, tentu saja perlu disikapi secara khusus dan fokus agar kemudian Program Pencetakan 5.000 Wirausaha Baru mendapatkan penilaian “Kategori Produktif”.

Model pengembangan yang dilaksanakan di tahun 2018 masih belum optimal dikarenakan terjadi penyesuaian di berbagai lembaga dan faktor lainnya serta merupakan proses dalam pencarian “model dan bentuk” yang paling sesuai dengan kondisi dan situasi masyarakat, lembaga, serta anggaran yang ada. Hal ini merupakan kewajaran dalam tata laksana sebuah program baru.

Pemerintah kota khususnya organisasi perangkat daerah yang menjadi fokus pelaksana pada program WUB baiknya bersikap *open mind* dan melakukan analisis terhadap kekuatan dan kelemahan pada setiap tahapan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2018 dan kemudian mempertahankan sekaligus memperkuat tahapan yang dianggap sudah kuat/baik dan memperbaharui yang masih lemah/kurang optimal.

Mempertimbangkan *role model* alternatif yang disusun dalam dokumen kajian ini dan menganalisa kemungkinan untuk menjadi model

yang dikembangkan bagi pelaksanaan program WUB di tahun 2020-2022.

Role model alternatif A adalah metode kolaboratif. *Role model* ini sebagian besar mengadopsi tahapan yang tertuang pada Peraturan Walikota No. 21 Tahun 2017. Namun demikian, pada *role model* kolaboratif diperbaharui dengan memberikan pembagian peran di antara lembaga terkait. Hal ini mempertimbangkan kondisi pelaksanaan di tahun 2018 yang mengalami kendala di tingkat OPD terkait dalam pelaksanaan kegiatan dikarenakan kekurangan SDM yang dapat menjadi pelaksana tugas kegiatan-kegiatan tersebut. Atas kondisi tersebut, pada *role model* kolaboratif pembagian peran disebar di berbagai lembaga dengan gambaran sebagai berikut.

Kelurahan dan kecamatan berfungsi sebagai lembaga yang mengkoordinir proses publikasi, pendaftaran, serta terlibat dalam proses rekrutmen calon peserta WUB. Seleksi administrasi dilakukan oleh kecamatan. Hasil seleksi administrasi diserahkan oleh pihak kecamatan kepada OPD terkait. Metode ini dilakukan agar para calon WUB lebih dekat ke lokasi pendaftaran yaitu di kecamatan yang dekat dengan lokasi kediaman mereka, sehingga mereduksi biaya mobilisasi/transporasi yang dikeluarkan oleh WUB 2018.

Organisasi perangkat daerah menerima hasil seleksi administrasi dari kecamatan dan kemudian bertugas melakukan wawancara kepada para calon peserta yang telah lolos pada seleksi wawancara. Pada wawancara ini juga menganalisa kondisi minat dan bakat para calon peserta WUB dengan metode wawancara langsung. Kegiatan wawancara juga dilakukan di kantor kecamatan agar dekat dengan lokasi kediaman para calon WUB dengan pertimbangan efisiensi biaya transportasi sebagaimana dipaparkan pada poin ke 1 (satu).

Organisasi perangkat daerah berkolaborasi dengan profesional dan atau dunia usaha melaksanakan kegiatan pelatihan kompetensi umum berupa pemberian motivasi kewirausahaan dan pelatihan kompetensi khusus berupa pelatihan praktik sesuai minat dan bakat para peserta WUB.

Organisasi perangkat daerah berkolaborasi dengan pengusaha melaksanakan kegiatan magang di perusahaan sesuai dengan minat dan bakat para peserta. Pada kegiatan ini diutamakan para peserta dapat menggali pengalaman seluas-luasnya tentang ilmu mengelola sebuah entitas usaha atau perusahaan.

Organisasi perangkat daerah berkolaborasi dengan profesional, lembaga pendidikan, konsultan, atau organisasi profesi tertentu melaksanakan kegiatan pendampingan dengan metode *technical assistance* serta inkubasi bisnis kepada para lulusan WUB dalam waktu minimal 1 tahun idealnya 3 tahun, hingga para WUB dipandang mampu mandiri dalam menjalankan entitas usahanya. Pada proses pendampingan ini, profesional yang ditunjuk mendampingi akan memberikan *technical assistance* kepada para peserta mengenai hal yang berkaitan dengan akses kepada pasar serta permodalan.

Role model alternatif B adalah metode pencetakan wirausaha dengan konsep inkubator bisnis. Model inkubator bisnis yang diterapkan mengacu pada konsep pengembangan inkubator bisnis ideal, mulai dari tahapan seleksi peserta, pelatihan, *case conference*, konsultasi serta pendampingan, akses kepada pendampingan dan akses kepada promosi/pemasaran. Pada pelaksanaan *role model* ini, seluruh tahapan kegiatan idealnya dilaksanakan oleh institusi atau lembaga yang memiliki kompetensi dan pengalaman dalam konsep pengembangan inkubator bisnis. Dengan demikian, pihak organisasi perangkat daerah direkomendasikan untuk menunjuk pihak ketiga dari lembaga profesional, lembaga pendidikan, atau institusi yang dipandang memiliki kompetensi pada konsep pengembangan inkubator bisnis.

Untuk mendukung realisasi serta implementasi dari revitalisasi Program Pencetakan 5.000 Wirausaha Baru, *role model* alternatif yang disusun pada kajian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan para pemangku kebijakan di Pemerintah Kota Tasikmalaya.

Role model alternatif yang dipandang sesuai dapat dituangkan ke dalam produk kebijakan resmi berupa Peraturan Walikota baru. Hal ini bertujuan agar, Perwalkot baru dapat menjadi acuan pada pelaksa-

naan kegiatan serta menjadi payung hukum terhadap pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran yang bersumber dari APBD Kota Tasikmalaya.

Role model alternatif dikembangkan sebagai upaya atau ikhtiar untuk mencapai target dari Program Pencetakan 5.000 Wirausaha Baru di Kota Tasikmalaya, sehingga perlu dianalisis, dipikirkan, dan disepakati oleh semua pihak. Kemudian selanjutnya secara kolaboratif dan bahu membahu dilaksanakan secara integratif oleh *stakeholder* terkait untuk meraih hasil yang maksimal sesuai harapan semua pihak. Sejatinya jika dapat tercapai target pencetakan wirausaha sebanyak 5.000 di Kota Tasikmalaya, tentu saja dampak positif akan diraih yaitu dengan penyerapan tenaga kerja dan pertumbuhan ekonomi daerah.

Glosarium

A

- Action* : Tindakan melakukan sesuatu.
- Advokasi : Usaha untuk memengaruhi kebijakan publik melalui bermacam-macam bentuk komunikasi persuasif.
- Aksesibilitas : Ukuran kemudahan lokasi untuk dijangkau dari lokasi lainnya melalui sistem transportasi.
- Akurasi : Ukuran yang menentukan tingkat kemiripan antara hasil pengukuran dengan nilai yang sebenarnya diukur.
- Analisis : Aktivitas objek dengan cara mendeskripsikan komposisi objek dan menyusun kembali komponen-komponennya untuk dikaji atau dipelajari secara detail.
- Apatis : Salah satu sikap seseorang yang pasrah dan menarik diri dalam menghadapi suatu keadaan.
- APBD : Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah di Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- Attention*
(perhatian/
atensi) : Pemrosesan secara sadar sejumlah kecil informasi dari sejumlah besar informasi yang tersedia.

B

- Benchmark* : Patokan atau tolak ukur untuk menilai atau membandingkan sesuatu.
- Berkompeten : Mampu melakukan sesuatu dengan baik. Kompeten merupakan keterampilan yang diperlukan seseorang yang ditunjukkan dengan kemampuan melakukan sesuatu dengan baik dan dapat memberikan tingkat kinerja yang memadai atau tinggi dalam suatu fungsi pekerjaan spesifik.
- Berkontribusi : Sumbangsih yang diberikan dalam berbagai bentuk, baik sumbangan berupa dana, program, sumbangan ide, tenaga yang diberikan kepada pihak lain untuk mencapai sesuatu yang lebih baik dan efisien.
- Best practice* : Istilah yang digunakan untuk mendeskripsikan pengalaman terbaik tentang keberhasilan seseorang dalam melaksanakan tugas profesinya.
- Bidang koperasi : Unsur pelaksana pada dinas koperasi usaha kecil menengah dan perdagangan yang mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang koperasi.

C

- Case conference* : Atau konferensi kasus adalah pertemuan yang direncanakan untuk membahas keadaan dan masalah seseorang atau beberapa orang (Wibowo,1984:85), suatu kelompok kecil orang-orang yang secara bersama-sama

- menyintesis, dan menginterpretasikan fakta yang telah diketahui mengenai seseorang.
- Coaching* : Memberikan instruksi, bimbingan ataupun pelatihan intensif.
- Compatible* : Mampu bergerak dan bekerja dengan keserasian, kesesuaian (misalnya mesin, komputer).
- Core business* : Kegiatan bisnis dalam suatu perusahaan yang bersifat inti dalam suatu struktural dan keberhasilannya tergantung seberapa baik perusahaan mengelola atau mengkoordinasi kegiatan untuk melakukan proses bisnis inti dan tidak tergantung dari departemen untuk melakukan suatu pekerjaan.

D

- Database* : Kumpulan data yang dikelola sedemikian rupa berdasarkan ketentuan tertentu yang saling berhubungan sehingga mudah dalam pengelolaannya.
- Desire* : Keinginan.
- Diprediksi : Perkiraan.
- Dipublikasikan : Pengumuman atau penerbitan.
- Direfleksikan : Rekaan, pantulan di luar kemauan (kesadaran) sebagai jawaban suatu hal atau kegiatan yang datang dari luar.
- Disruptive* : Berbagai hal yang mengacu pada teknologi dan mampu memberikan pengaruh yang sangat besar pada industri ataupun pasar.
- Distributor : Pihak perantara yang menyalurkan produk dari produsen ke retailer maupun konsumen.

E

- E-commerce* : Model bisnis yang memungkinkan perusahaan atau individu bisa membeli atau menjual barang melalui internet (*online*).
- Edukasi : Segala keadaan, hal, peristiwa, kejadian, atau tentang suatu proses perubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok dalam usaha mendewasakan manusia.
- Efektif : Suatu akibat yang mengarah positif dan berhasil.
- Efektifitas : Ukuran hasil tugas atau keberhasilan dalam mencapai tujuan.
- Efisien : Menitikberatkan pada penggunaan sumber daya untuk mencapai hasil tertentu.
- Efisiensi : Kemampuan untuk melakukan sesuatu atau menghasilkan sesuatu tanpa membuang bahan, waktu, atau energi.
- Eksekusi : Pelaksanaan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau pasti.
- Energik* : Penuh energi / bersemangat.
- Entitas bisnis : Suatu konsep fundamental dalam pengembangan laporan keuangan.
- Entrepreneur* : Seseorang yang kreatif dan inovatif, dan membawa ide-ide baru dalam memulai sebuah bisnis.
- Era revolusi industri 4.0 : Sebuah fenomena dimana terjadinya kolaborasi antara teknologi siber dengan teknologi otomatisasi.
- Euforia : Perasaan nyaman atau perasaan gembira yang berlebihan.
- Evaluasi : Proses menentukan nilai untuk suatu hal atau objek yang berdasarkan pada acuan-

acuan tertentu untuk menentukan tujuan tertentu.

F

- Familier : Bersifat kekeluargaan.
- Fantastis : Bersifat fantasi, tidak nyata.
- Fasilitator : Seseorang yang membantu sekelompok orang memahami tujuan bersama mereka dan membantu mereka membuat rencana guna mencapai tujuan tersebut tanpa mengambil posisi tertentu dalam diskusi.
- Finansial : Suatu bidang ekonomi yang berfokus pada keuangan.
- Fintech* : *Financial technology* (teknologi keuangan) *fintech* adalah inovasi teknologi yang dikembangkan dalam bidang finansial sehingga transaksi keuangan bisa dilakukan dengan praktis, mudah, dan efektif.
- Founder* : Orang yang pertama kali membuat atau mencetuskan sebuah ide usaha atau yang dikenal dengan istilah pendiri dari sebuah perusahaan.
- Funding* : Tindakan menyediakan sumber daya untuk membiayai kebutuhan, program, atau proyek.

G

- Holistik : Terapi untuk menangani pikiran, tubuh, dan jiwa untuk mendukung kesehatan dan penyembuhan. Biasanya, pengobatan holistik menggabungkan pengobatan tradisional, komplementer, dan alternatif (cam).

I

- Ide inovatif : Keterampilan yang sangat berharga, terutama bagi wirausaha.
- Implementasi : Memiliki makna pelaksanaan atau penerapan.
- Inkubasi bisnis : Program atau organisasi yang memberikan sponsor dengan tujuan mempercepat pertumbuhan dan sukses suatu *startup* atau bisnis.
- Inovasi : Semua hal baru yang berangkat dari ilmu pengetahuan, serta dapat memberikan manfaat dalam kehidupan manusia.
- Inovator : Orang yang memperkenalkan gagasan, metode, dan sebagainya yang baru.
- Inspirasi : Proses stimulasi mental untuk melakukan atau merasakan sesuatu, khususnya melakukan sesuatu yang kreatif.
- Institusi : Universitas, kementerian/lembaga, pemerintah daerah, industri, atau organisasi masyarakat.
- Institusi swasta : Institusi yang dibentuk oleh swasta (organisasi swasta).
- Integrasi : Kesatuan atau pembulatan.
- Integratif : Penyatuan atau penggabungan, pembaharuan hingga menjadi kesatuan yang utuh.
- Inten : Hebat atau sangat kuat (tentang kekuatan, efek, dan sebagainya).
- Intensif : Dengan sungguh-sungguh mengerjakan sesuatu sehingga memperoleh hasil yang diinginkan.
- Interest* : Minat.

- Intervensi : Salah satu bentuk dari turut campurnya dalam urusan negara lain yang memiliki sifat diktatorial.
- Investor : Setiap orang atau entitas lain seperti perusahaan yang memberikan modal dengan harapan menerima pengembalian finansial, bahkan lebih banyak dari apa yang ditanamkan sebelumnya.

K

- Karakteristik : Tanda, ciri, atau fitur yang bisa digunakan sebagai identifikasi.
- Kaskus : Situs forum komunitas maya indonesia dan penggunaanya disebut dengan kaskuser.
- Keinovasian : Bertindak melakukan sesuatu yang baru, penerapan dari kreativitas.
- Kolaborasi : Proses bekerja sama untuk menelurkan gagasan atau ide dan menyelesaikan masalah secara bersama-sama menuju visi bersama.
- Kolaboratif : Bersifat kolaborasi.
- Komitmen : Bentuk dedikasi atau kewajiban yang mengikat kepada orang lain, hal tertentu, atau tindakan tertentu.
- Komoditas : Sebuah barang atau produk yang dapat diperdagangkan.
- Kompetisi : Kegiatan mencapai tujuan dengan mengalahkan orang/keompok lain.
- Kompetitif : Suatu sikap yang berhubungan dengan persaingan atau kompetisi.
- Konsistensi : Ketetapan dan kemantapan dalam bertindak.
- Konstelasi : Kumpulan orang, sifat, atau benda yang berhubungan.

- Konsumtif : Suatu perilaku yang tidak lagi didasarkan pada pertimbangan yang rasional, melainkan karena keinginan yang sudah tidak mencapai taraf tidak rasional lagi.
- Konteks : Bagian suatu uraian atau kalimat yang dapat mendukung atau menambah kejelasan makna.
- Kontradiktif : Bersifat kontradiksi; berlawanan; bertentangan.
- Konvensional : Menandakan kesepakatan umum terkait hal-hal yang lampau, seperti adat, kebiasaan, dan kelaziman. Secara singkat, konvensional memiliki arti tradisional.
- Korporasi : Perusahaan atau badan usaha yang sangat besar atau beberapa perusahaan yang dikelola dan dijalankan sebagai satu perusahaan besar.
- Kreativitas : Kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru, baik yang benar-benar merupakan hal baru atau sesuatu ide baru yang diperoleh dengan cara menghubungkan beberapa hal yang sudah ada dan menjadikannya suatu hal baru.

L

- Lazim : Sudah biasa; sudah menjadi kebiasaan; sudah umum (terdapat, terjadi, dilakukan, dan sebagainya).
- Lisensi : Izin yang diberikan oleh pemegang paten, baik yang bersifat eksklusif maupun non-eksklusif, kepada penerima lisensi berdasarkan perjanjian tertulis untuk menggunakan

paten yang masih dilindungi dalam jangka waktu dan syarat tertentu.

M

- Marketer* : Seseorang yang memiliki tanggung jawab untuk mempromosikan produk atau jasa atas nama perusahaan.
- Mekanisme : Pandangan bahwa interaksi bagian-bagian lainnya dalam suatu keseluruhan atau sistem secara tanpa disengaja menghasilkan kegiatan atau fungsi-fungsi sesuai dengan tujuan.
- Mencitrakan : Menggambarkan.
- Mengantisipasi : Mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan akan terjadinya suatu peristiwa.
- Mengidentifikasi : Menentukan atau menetapkan identitas (orang, benda, dan sebagainya).
- Mentalitas : Keadaan dan aktivitas jiwa (batin), cara berpikir, dan berperasaan.
- Mereduksi : Membuat pengurangan, potongan (harga dan sebagainya).
- Merevitalisasi : Upaya untuk memvitalkan kembali suatu kawasan atau bagian kota yang dulunya pernah vital/hidup, akan tetapi kemudian mengalami kemunduran/degradasi.
- Metode *training of trainers* (TOT) : Pelatihan bagi calon instruktur atau fasilitator agar ia mampu mentransferkan keahliannya secara tepat.
- Metodologi : Cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara saksama untuk mencapai suatu tujuan.
- Mindset* : Pola pikir.

Mobilisasi : Tindakan pengerahan dan penggunaan secara serentak sumber daya nasional serta sarana dan prasarana nasional yang telah dibina dan dipersiapkan sebagai komponen kekuatan pertahanan keamanan negara untuk digunakan secara tepat, terpadu, dan terarah bagi penanggulangan setiap ancaman, baik dari luar maupun dari dalam negeri.

Monitoring : Aktivitas yang ditujukan untuk memberikan informasi tentang sebab dan akibat dari suatu kebijakan yang sedang dilaksanakan.

O

OPD : Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Oportunis : Orang yang paham dan semata-mata hendak mengambil keuntungan untuk diri sendiri dari kesempatan yang ada tanpa berpegang pada prinsip tertentu.

Optimalisasi : Proses, cara atau perbuatan mengoptimalkan.

Orientasi : Peninjauan untuk menentukan sikap yang tepat dan benar.

Otoritas : Kekuasaan yang sah yang diberikan kepada lembaga dalam masyarakat yang memungkinkan para pejabatnya menjalankan fungsinya.

P

Parameter : Ukuran suatu keadaan secara relatif.

Pemetaan : Pengelompokan suatu kumpulan wilayah yang berkaitan dengan beberapa letak geografis wilayah yang meliputi dataran tinggi, pegunungan, sumber daya dan potensi pen-

		duduk yang berpengaruh terhadap sosial kultural yang memiliki ciri khas khusus dalam penggunaan skala yang tepat.
Per kapita	:	Indikator atau tolak ukur dalam mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat pada suatu negara.
Personalia	:	Departemen yang bertugas melaksanakan serangkaian kegiatan pengelolaan SDM pada hal-hal yang terkait administratif guna mengatur hubungan kerja antara perusahaan dan karyawannya.
Perwalkot	:	Peraturan daerah kota.
<i>Platform marketing</i>	:	Perangkat lunak atau solusi <i>online</i> yang membantu pemasar digital mengelola aktivitas pemasaran digital.
Potensi	:	Kemampuan yang mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan; kekuatan; kesanggupan; daya.
Potensial	:	Mempunyai potensi (kekuatan, kemampuan, kesanggupan); daya berkemampuan.
Prasarana	:	Segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses
Produktif	:	Sebuah cara untuk mendapatkan hasil yang diinginkan dengan sedikit waktu dan sedikit usaha.
Program OK OCE	:	Gerakan sosial penciptaan lapangan kerja, OK OCE, terus memberikan kontribusi positif untuk bangsa.
Program WUB	:	Program pembangunan ekonomi strategis yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah yang bertujuan membentuk 5.000 (lima ribu) wirausaha baru.

Q

Questionnaire : Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab.

R

Rasio : Angka yang menunjukkan hubungan secara matematis antara suatu jumlah dan jumlah yang lain.

Rasional : Suatu pola pikir dimana seseorang cenderung bersikap dan bertindak berdasarkan logika dan nalar manusia.

Realisasi : Tindakan untuk mencapai sesuatu yang direncanakan atau diharapkan.

Referensi : Informasi yang dijadikan rujukan atau petunjuk dengan tujuan untuk mempertegas suatu pernyataan.

Regional : Sebuah kawasan yang memiliki karakteristik tertentu.

Rekrutmen : Proses penarikan sekelompok kandidat untuk mengisi posisi atau jabatan yang kosong pada suatu perusahaan atau organisasi.

Relatif : Apa yang tidak dapat didefinisikan tanpa acuan pada sesuatu hal lainnya.

Relevan : Hal bersangkutan paut, yang memiliki hubungan, atau selaras dengan.

Relevansi : Kaitan atau hubungan erat terkait pokok masalah yang sedang dihadapi.

Responden : Orang-orang yang dimintai tanggapan dari pertanyaan yang telah terstruktur maupun semi-terstruktur untuk menjadi sumber data di dalam suatu penelitian.

Revitalisasi	: Suatu proses atau cara dan perbuatan untuk menghidupkan kembali suatu hal yang sebelumnya terberdaya.
Rintisan	: Istilah yang merujuk pada semua perusahaan yang belum lama beroperasi.
Riset	: Penelitian mengenai suatu isu atau masalah yang dilakukan secara ilmiah dan berdasarkan fakta empiris.
Risiko	: Bahaya, akibat atau konsekuensi yang dapat terjadi akibat sebuah proses yang sedang berlangsung atau kejadian yang akan datang.
RKPD	: (rencana kerja pemerintah daerah) bahaya, akibat atau konsekuensi yang dapat terjadi akibat sebuah proses yang sedang berlangsung atau kejadian yang akan datang.
<i>Role model</i>	: Teladan yang bisa memberikan contoh yang baik kepada orang lain.
RPJMD	: (rencana pembangunan jangka menengah daerah) dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai landasan dan pedoman bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan 5 (lima) tahun.
Runut	: Jejak (bekas tapak kaki dan sebagainya).
S	
Sarana	: Segala sesuatu yang dipakai sebagai alat untuk mencapai makna dan tujuan.
<i>Sharing</i>	: (Berbagi) pemakaian secara bersama atas sumber daya atau ruang.
Signifikan	: Sesuatu/seseorang yang dianggap penting atau berarti karena dapat memberikan pengaruh atau dampak, dan tidak bisa lepas dari suatu persoalan.

Sinergi	: Membangun dan memastikan hubungan kerja sama internal yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan, untuk menghasilkan karya yang bermanfaat dan berkualitas.
Sistem	: Suatu kesatuan yang terdiri atas komponen atau elemen yang dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran informasi, materi, atau energi untuk mencapai suatu tujuan.
SKPD	: (Satuan Kerja Perangkat Daerah) pelaksana fungsi eksekutif yang harus berkoordinasi agar penyelenggaraan pemerintahan berjalan dengan baik.
Solid	: Kuat; kukuh; berbobot.
Sosialisasi	: Suatu proses belajar-mengajar dalam berperilaku di masyarakat.
<i>Spending cost</i>	: Biaya pengeluaran.
<i>Stakeholder</i>	: Semua pihak baik itu individu, komunitas atau kelompok masyarakat yang memiliki hubungan dan kepentingan terhadap organisasi, perusahaan dan permasalahan yang sedang dibahas.
Substansi	: Watak yang sebenarnya dari sesuatu.
Survei	: Metode penelitian yang digunakan untuk mendapatkan informasi dan wawasan tentang berbagai topik yang diminati.
<i>Sustainable</i>	: Kemampuan untuk hidup dan berkembang tanpa menghabiskan sumber daya alam untuk masa depan.

T

<i>Talent mapping</i>	: Serangkaian tes yang dilakukan dengan tujuan menemukan potensi diri.
-----------------------	--

- Teoritis : Identifikasi teori-teori yang dijadikan sebagai landasan berpikir untuk melaksanakan suatu penelitian.
- Terminologi : Suatu ilmu tentang istilah dan penggunaannya.
- Timing* : Pengaturan waktu.
- Trial and error* : Salah satu metode pemecahan masalah yang cukup sulit dilakukan karena harus mencoba dengan kegagalan sampai berulang kali.

U

- Unicorn : Istilah atau gelar yang disematkan kepada perusahaan atau startup yang memiliki nilai valuasi mencapai 1 miliar dolar AS atau sekitar Rp 14 triliun.
- Urbanesia : Sebuah portal web yang berisi berita dan artikel daring di Indonesia.
- Usaha mikro : Usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan.

V

- Variatif : Bersifat variasi.
- Visual : Dapat dilihat dengan indra penglihat (mata); berdasarkan penglihatan.

W

- Waiting list* : Daftar orang yang ingin meminta sesuatu.
- Warta : Berita; kabar.

the 1990s, the number of people in the world who are illiterate has increased from 1.2 billion to 1.5 billion. The number of illiterate people in the world is expected to reach 1.8 billion by the year 2015 (UNESCO, 2003).

There are many reasons for the increase in illiteracy. One of the reasons is the rapid population growth in the world. Another reason is the lack of access to education, especially in rural areas. In many developing countries, the majority of the population lives in rural areas, and access to education is limited. This is due to a number of factors, including the lack of schools, the high cost of education, and the need for children to work to help support the family.

Another reason for the increase in illiteracy is the lack of motivation to learn. In many developing countries, the majority of the population is poor, and the need for immediate income often takes precedence over the need for education. This is especially true for women, who are often responsible for the household and have less time to spend on education. In addition, the quality of education in many developing countries is poor, and this may lead to a lack of motivation to learn.

The increase in illiteracy has serious consequences for the world. It limits the ability of people to read and write, which is essential for many aspects of life, including finding a job, accessing health care, and participating in community activities. It also limits the ability of people to learn and improve their skills, which is essential for economic development. The increase in illiteracy is a major challenge for the world, and it is important to find ways to reduce it.

There are many ways to reduce illiteracy. One way is to improve access to education, especially in rural areas. This can be done by building schools, providing transportation, and reducing the cost of education. Another way is to increase the motivation to learn. This can be done by providing incentives, such as cash or food, for children who attend school. It can also be done by providing a quality education that is relevant to the needs of the community.

Another way to reduce illiteracy is to provide literacy training. This can be done through a number of different methods, including one-to-one tutoring, group instruction, and self-paced learning. Literacy training can be provided in a number of different settings, including schools, community centers, and homes. It is important to provide literacy training in a way that is appropriate to the needs of the learners.

The increase in illiteracy is a major challenge for the world, and it is important to find ways to reduce it. There are many ways to reduce illiteracy, and it is important to find the best way for each country. The goal is to provide everyone with the opportunity to learn and improve their skills, so that they can live a better life. The world needs to work together to reduce illiteracy, and we can make a difference.

References

- UNESCO. (2003). *Global Education Trends*. Paris: UNESCO.

Indeks

A

action, 42
advokasi, 28
aksesibilitas, 3, 4, 27
akurasi, 45
analisis, 49, 69
apatis, 16
APBD, 28, 72
attention, 42

B

benchmark, 33, 38, 45
berkompeten, 25
berkontribusi, 13
best practice, 34
bidang koperasi, 22

C

case conference, 71
coaching, 28
compatible, 11
core business, 20, 21

D

desire, 42

diprediksi, 36

dipublikasikan, 8

direfleksikan, 65

disruptive, 20, 21

E

e-commerce, 19, 20

edukasi, 19

efektif, 5, 16

efisien, 5, 15, 46

efisiensi, 70

eksekusi, 19

energik, 14

entrepreneur, 11, 20

era revolusi industri 4.0, 16

euforia, 20, 21

evaluasi, 3, 6, 26, 28, 29

F

familier, 16, 20

fasilitator, 24, 27, 38, 66

finansial, 46

fintech, 20

founder, 18, 19, 20, 33

funding, 17

I

ide inovatif, 12
idealab, 1
implementasi, 41, 45, 71
inkubasi bisnis, 28, 71
inovator, 15
inspirasi, 58, 59
institusi, 5, 7, 16, 33, 34, 38, 71
institusi swasta, 5
intensif, 38
interest, 42
intervensi, 45
investor, 19, 21

K

karakteristik, 18
keinovasian, 11
kolaborasi, 5, 34
komitmen, 3, 38
komoditas, 3, 28
kompetisi, 19
konstelasi, 33
konteks, 37
kontradiktif, 59
korporasi, 18
kreativitas, 11, 20

L

lisensi, 41

M

marketer, 15
regional, 28

mekanisme, 49
mengidentifikasi, 6, 15
mentalitas, 39
metode *Training of Trainers* (TOT), 40
metodologi, 6, 15
mindset, 38, 39

O

OPD, 8, 45, 46, 65, 66, 70
oportunis, 15
orientasi, 12, 15
otoritas, 36

P

parameter, 35
pemetaan, 24, 27, 45, 46
per kapita, 18
Perwalkot, 23, 45, 71
platform marketing, 37
potensi, 13, 14, 18, 21, 24, 27, 46
potensial, 19
produktif, 4, 13, 69
profiling, 24
program OK OCE, 33, 38

R

rasio, 40
rasional, 5
realisasi, 39, 40, 71
referensi, 11
substansi, 33, 34

rekrutmen, 3, 7, 23, 35, 50, 51,
70

relatif, 19

relevan, 49

relevansi, 20

revitalisasi, 5, 71

rintisan, 16, 17

riset, 17, 18

RKPD, 3

role model, 5, 69, 70, 71, 72

RPJMD, 3, 5, 34

runut, 45

S

schedule, 50

sharing, 19

sistem, 3, 6, 29, 35, 47

SKPD, 35

solid, 19

spending cost, 46

sustainable, 40

T

talent mapping, 4, 51, 52, 53, 54

tata kelola, 37, 45, 47

teoritis, 54, 56

terminologinya, 17

timing, 17

trial and error, 20

U

Urbanesia, 20

usaha mikro, 22

V

visual, 58

W

waiting list, 45

Profil Penulis



Aneu Yulianeu, lahir di Garut, Jawa Barat pada tahun 1976. Kemudian menyelesaikan jenjang sarjana di STMIK DCI Kota Tasikmalaya pada tahun 2006. Pendidikan master dimulai tahun 2008 di Universitas Siliwangi Kota Tasikmalaya, dengan mengambil konsentrasi Manajemen Sumber Daya manusia dengan mengambil fokus Kepemimpinan Transformasional dalam tesis yang dibuatnya, 15 bulan kuliah dan akhirnya lulus tahun 2010. Sebab sudah terlanjur jatuh cinta dengan ilmu manajemen, maka di tahun yang hampir sama dengan mengambil gelar master sekolah di strata-1 di STIE Latifah Mubarakiyah kabupaten Tasikmalaya dengan mengambil konsentrasi Manajemen Sumber Daya Manusia dengan mengambil fokus Kepemimpinan Transformasional dalam skripsi yang dibuatnya, lulus menjadi seorang doktor dalam ilmu manajemen di Universitas Jendral Soedirman pada tahun 2022 pun sama dengan mengambil konsentrasi sumber daya manusia dalam menyusun disertasinya dan fokus pada Kepemimpinan Transformasional. Buku ini merupakan buku ke-7 yang ditulis oleh Aneu dan menjadi buku referensi pertama sebagai jalan menuju mimpi setiap dosen yaitu menjadi seorang guru besar.



Muhamad Nurdin Yusuf dilahirkan di Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya pada tanggal 13 Maret 1976 merupakan anak pertama dari dua bersaudara dari pasangan bernama H. Endang ruchimat dengan Hj. Entin Kartini (Almh). Berkarier sebagai dosen tetap di STIE Latifah Mubarokiyah Pondok Pesantren Suryalaya Tasikmalaya terhitung mulai tanggal 1 September 1999 sampai dengan 15 Agustus 2009, dan sejak tanggal 10 Oktober 2009 tercatat sebagai dosen tetap pada Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Galuh. Kuliah di Fakultas Ekonomi Program Studi Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Universitas Siliwangi dan lulus sebagai sarjana ekonomi pada tahun 1999. Tahun 2000 melanjutkan studi S2 di perguruan tinggi yang sama pada bidang Ekonomi Pertanian dengan kajian Pembangunan Pertanian dan mendapat gelar magister pertanian tahun 2003. Pendidikan S3 ditempuhnya di Universitas Padjajaran Bandung tahun 2013 peminatan Pembangunan Pertanian dengan beasiswa penuh dari pemerintah dan memperoleh gelar doktor tahun 2018.